



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V JAMBI

LAPORAN KINERJA TA. 2023

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii

1

BAB I. Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

8

BAB II. Perencanaan Kinerja

- A. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- B. Tujuan Strategis BPK Wilayah V
- C. Rencana Kinerja Jangka Menengah
- D. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi TA 2024
- E. Program Prioritas

14

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

72

BAB IV. Penutup

76

Lampiran

- A. Perjanjian Kinerja (Awal)
- B. Perjanjian Kinerja (Revisi)
- C. Pengukuran Kinerja
- D. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

KATA PENGANTAR



DR. Agus Widiatmoko.,S.S.,M.M
Kepala BPK Wilayah V

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V di wilayah Kerja Provinsi Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan BPK Wilayah V sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menggambarkan pelaksanaan program dan capaian kinerja awal berdasarkan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja, dan evaluasi kinerja. Realisasi target kinerja BPK Wilayah V secara umum telah berhasil dilaksanakan, sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Wilayah V yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan.

Harapan Laporan Kinerja BPK Wilayah V dapat memberikan gambaran objektif dan transparan tentang kinerja yang dihasilkan oleh BPK Wilayah V selama tahun 2023. Terutama dalam hal pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. BPK Wilayah V menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik sinergitas internal di lingkungan BPK Wilayah V maupun dukungan dan kebijakan dari para Pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja BPK Wilayah V tahun 2023 ini. Semoga Laporan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi kinerja pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Jambi, Januari 2024
Kepala

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V

Agus Widiatmoko



Iktisar Eksekutif

Laporan Kinerja BPK Wilayah Tahun 2023 memberikan informasi tingkatan capaian 4 sasaran kegiatan, dan 4 indikator kinerja kegiatan, sebagaimana ditetapkan di Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala BPK Wilayah V dengan Direktur Jenderal Kebudayaan. Secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tingkat ketercapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan lebih detail pada uraian BAB III. Berikut capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan secara umum tahun 2023:

Penyerapan Anggaran:

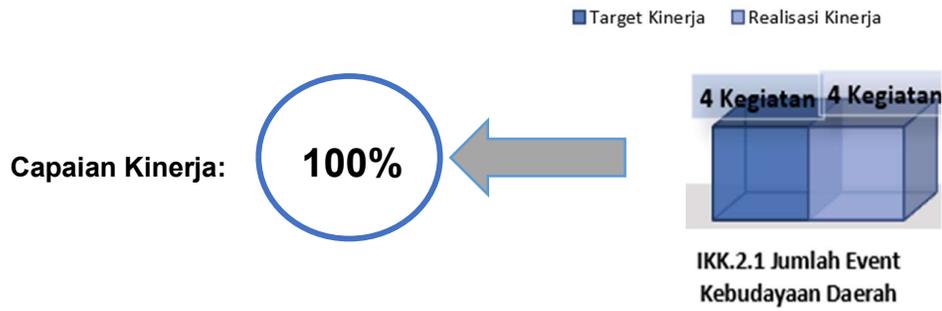


Capaian Kinerja:

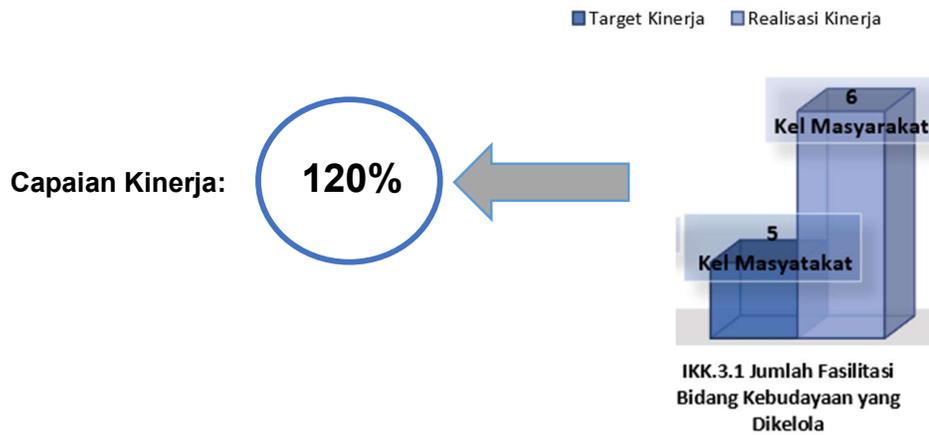
SK.1 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi:



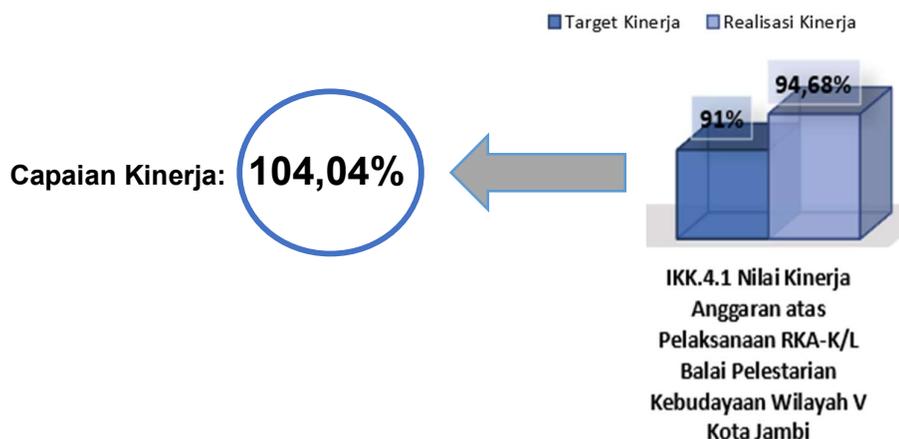
SK.2 Jumlah Event Kebudayaan Daerah



SK. 3 Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola



SK.4 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:



Permasalahan Umum

1. Mereviu/ memonitoring kembali kegiatan yang belum terlaksana setiap bulannya agar rencana di Tahun berikutnya dapat terealisasi sesuai dengan jadwal Kegiatan (*Timeline*) dan *Actionplan*,
2. Perbaiki tata kelola BPK Wilayah V melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan swakelola yang memberikan dampak ekonomi langsung masyarakat tetap dijalankan, dengan protokol kesehatan yang ketat,
3. Permintaan tenaga pelestarian dari instansi terkait baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, sehingga mempengaruhi kinerja SDM yang di rencanakan sebelumnya dalam menjalankan program-program di BPK Wilayah V, dan
4. Koordinasi dan kolaborasi secara berkesinambungan baik di internal BPK Wilayah V maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, swasta serta peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan.

Langkah Antisipasi

1. Pengoptimalisasi anggaran serta mereviu/ memonitoring kembali kegiatan yang belum terlaksana setiap bulannya agar rencana di tahun berikutnya dapat terealisasi sesuai dengan jadwal Kegiatan (*timeschedule*) dan *Actionplan* terkait pencapaian nilai kinerja anggaran serta penilaian Sakip,
2. Melakukan optimalisasi peran dan fungsi SDM yang tersedia dengan memberdayakan SDM yang ada, serta mengoptimalkan layanan pendidikan dan kebudayaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK Wilayah V ,
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melestarikan warisan budaya, dan
4. Memastikan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum**
- B. Dasar Hukum**
- C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi**

A. GAMBARAN UMUM

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V sebagai Unit Pelaksana Teknis yang meliputi wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki wilayah cukup luas dan aksesibilitas yang belum seluruhnya dapat dijangkau dengan mudah. Peran masyarakat akan mendukung pelaksanaan kegiatan yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dalam perjalanan institusi pemerintah pusat dan sebagai unit pelaksanaan teknis Kemendikbudristek telah mengalami dinamika perubahan nama dan nomenklatur yang semula bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0767/0/1989 Tanggal 7 Desember 1989. Selanjutnya, menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 51/OT.001/MKP/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala menyebutkan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Peninggalan Purbakala.

Pada oktober tahun 2012 dengan adanya moratorium dari Presiden Republik Indonesia yaitu tentang pemindahan fungsi kebudayaan yang semula melekat pada fungsi pariwisata berpindah dan melekat dengan fungsi pendidikan yang kemudian tergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian di tahun 2015 telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Tahun 2015 telah terbit Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya yang menjelaskan bahwa nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi. Selanjutnya atas perubahan penataan organisasi dan tata kerja sesuai Permendikbudristek Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi pada wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V pada wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan perubahan tersebut menyebabkan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V selanjutnya menangani pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah SDM meliputi: 54 orang PNS, 99 orang tenaga Juru Pelihara non PNS, 23 orang tenaga PPNPN, dan 25 orang Tenaga Satuan Pengaman Non PNS.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan.
10. DIPA Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Wilayah Kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor : 023.15.2.526065/2023 Tanggal 26 Mei 2023.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, berikut rincian tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V;

1. Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V

Melaksanakan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.

2. Fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:

- a. pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- b. fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- c. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- d. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Susunan Organisasi

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan meliputi tugas sebagai berikut;

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kepala Subbagian umum mempunyai tugas yaitu melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan

kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dibantu oleh kelompok kerja Administrasi dan Teknis. Kelompok kerja Administrasi terdiri dari 3 (tiga) kelompok kerja yaitu Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga/BMN, dan kelompok kerja Teknis terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja yaitu kelompok kerja Inventarisasi Warisan Budaya, Pengamanan Warisan Budaya, Penyelamatan Warisan Budaya, dan Pemeliharaan Warisan Budaya.

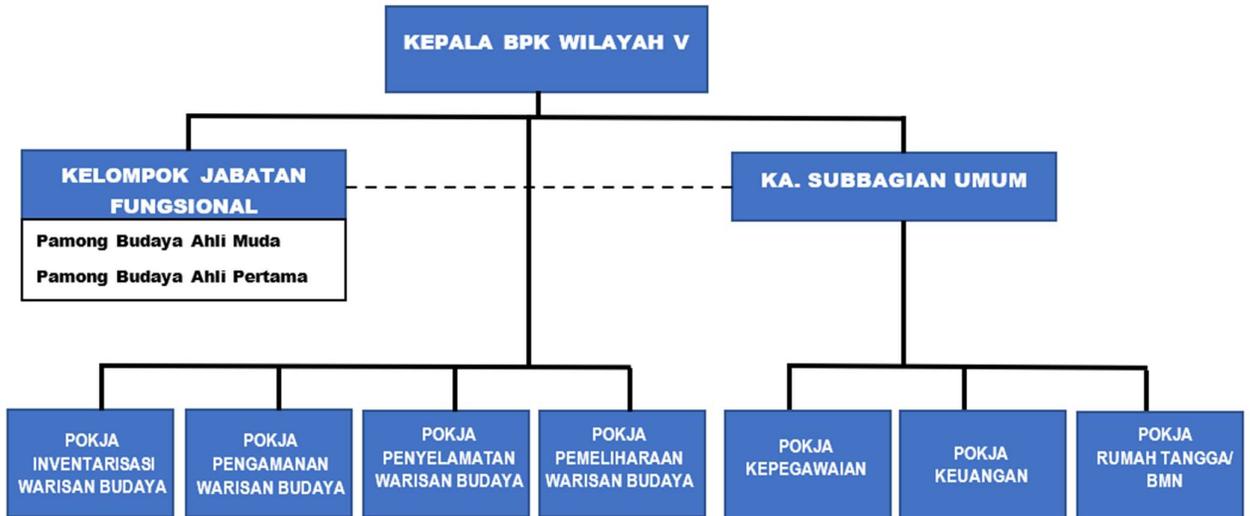
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kelompok Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.

4. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V pada Tahun 2023;

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V



D. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Isu Strategis	Peran Strategis
1. Perubahan struktur organisasi dan tugas fungsi dari satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V.	Perubahan struktur organisasi internal, pemetaan SDM, dan menyusun strategi capaian pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan.
2. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan <i>timeschedule</i> dan <i>actionplan</i> yang direncanakan pada awal tahun.	Pengoptimalisasi anggaran serta mereviu/ memonitoring kembali kegiatan yang belum terlaksana setiap bulannya agar rencana di tahun berikutnya dapat terealisasi sesuai dengan jadwal Kegiatan <i>timeschedule</i> dan <i>Actionplan</i> terkait pencapaian nilai kinerja anggaran serta penilaian Sakip.
3. Perbaikan tata kelola BPK Wilayah V melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Melakukan optimalisasi peran dan fungsi SDM yang tersedia dengan memberdayakan SDM yang ada, serta mengoptimalkan layanan pendidikan dan kebudayaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK Wilayah V.
4. Permintaan tenaga pelestarian warisan budaya dari instansi terkait baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat sehingga mempengaruhi kinerja SDM yang di rencanakan sebelumnya dalam menjalankan program-program di BPK Wilayah V.	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melestarikan warisan budaya.
5. Koordinasi dan kolaborasi secara berkesinambungan baik di internal BPK Wilayah V maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, swasta serta peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan.	Memastikan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antarpemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi**
- B. Tujuan Strategis BPK Wilayah V**
- C. Rencana Kinerja Jangka Menengah**
- D. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi TA 2024**
- E. Program Prioritas**

VISI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Untuk mendukung Visi dan Misi Presiden sebagai berikut:

“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian melalui Terciptanya Pelajar Pancasila yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, Bergotong royong dan Berkebhinekaan Global”



Tujuan Strategis

1. Peningkatan Jumlah dari Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi;
2. Peningkatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah;
3. Peningkatan Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola; dan
4. Penguatan Sistem Tata Kelola BPK Wilayah V.

Rencana Kinerja Jangka Menengah

Proses perencanaan terpadu bidang kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini kemudian diwujudkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui Kongres tersebut, disepakat ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020 – 2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif,
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional,
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional,
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem,
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan, dan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Rencana kinerja jangka menengah tahun 2020–2024 BPK Wilayah V mengampu Sasaran Kegiatan (SK) dirancang pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tertuang pada dokumen renstra Kemendikbudristek tahun 2020–2024 guna menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kerja yang telah direncanakan setiap tahun. Berdasarkan perjanjian kinerja yang berlandaskan Renstra BPK Wilayah V tahun 2020–2024. Berikut uraian rencana kinerja jangka menengah BPK Wilayah V tahun 2020–2024:

Tabel 2.1 Rencana Kerja Jangka Menengah BPK Wilayah V

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Perjanjian Kinerja		
			2022	2023	2024
SK.1 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi					
IKK.1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	244	46	53
SK.2 Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah					
IKK.2.1	Jumlah event kebudayaan daerah	Kegiatan	-	4	4
SK.3 Meningkatnya jumlah fasilitas bidang kebudayaan yang dikelola					
IKK 3.1	Jumlah fasilitas bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	-	5	15

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Perjanjian Kinerja		
			2022	2023	2024
SK. 4 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V					
IKK.4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V	Nilai	92	91	92

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal)

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, BPK Wilayah V merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Anggaran Program BPK Wilayah V Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp12.217.583.000
6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp34.643.073.000
Anggaran BPK Wilayah V TA 2023		Rp46.860.656.000

Tabel 2.3 Rincian Perjanjian Kinerja BPK Wilayah V Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	46 Unit
[SK 2] Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah	[IKK 2.1] Jumlah Event Kebudayaan Daerah	4 Kegiatan
[SK 3] Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	[IKK 3.1] Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	5 Kelompok Masyarakat
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/ Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	91

Pada tahun 2023, BPK Wilayah V melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja berupa penambahan anggaran bersumber dari Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) Nomor: S-62/MK.2/2023 sebesar Rp.9.221.943.000,- diutamakan untuk melaksanakan program prioritas nasional pada kegiatan revitalisasi di Kawasan Cagar

Budaya Nasional Muarajambi. Anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan Program Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya dengan sasaran kegiatan meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi yang dinilai mampu untuk meningkatkan pelestarian dan Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi.

Hasil dari penyesuaian Perjanjian Kinerja anggaran yang diampu oleh BPK Wilayah V TA 2023 sebesar Rp.55.933.999.000,-, namun dalam penyesuaian target kinerja tidak mengalami perubahan pada perjanjian kinerja TA 2023 dikarenakan menyesuaikan target kinerja TA 2023 pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPK Wilayah V, sehingga dalam pengukuran capaian kinerja maupun pengukuran capaian kinerja anggaran tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan mengacu penambahan anggaran sebesar Rp 9.221.943.000,- dan target kinerja sebanyak 1 unit pada Program Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya TA 2023 dalam kegiatan Revitalisasi di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi)

Berkenaan dengan penyesuaian indikator kinerja dan anggaran yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Perjanjian Kinerja revisi tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Anggaran Program BPK Wilayah V Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp12.068.983.000
6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp43.865.016.000
Anggaran BPK Wilayah V TA 2023		Rp55.933.999.000

Tabel 2.5 Rincian Perjanjian Kinerja BPK Wilayah V Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	46 Unit
[SK 2] Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah	[IKK 2.1] Jumlah Event Kebudayaan Daerah	4 Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 3] Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	[IKK 3.1] Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	5 Kelompok Masyarakat
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/ Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	91

Program Prioritas

Pencapaian kinerja Kemendikbudristek untuk mendukung kinerja nasional bidang pendidikan dan kebudayaan, BPK Wilayah V melaksanakan berbagai program prioritas yang alokasi anggarannya bersumber dari BA-BUN dalam Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) Nomor: S-62/MK.2/2023 diutamakan untuk membiayai program prioritas Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.221.943.000,-.

Pelaksanaan program prioritas Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi terdiri dari 2 kegiatan pada rincian output Cagar Budaya, ODCB dan OPK dengan target kinerja sebanyak 1 unit. Berikut rincian kegiatan pada program prioritas Revitalisasi Cagar Budaya Nasional Muarajambi yang diampu BPK Wilayah V tahun 2023:

Tabel 2.6 Rincian Kegiatan Program Prioritas Revitalisasi Cagar Budaya Nasional Muarajambi Tahun 2023

Program Prioritas			Satuan	Target	Alokasi Anggaran
Cagar Budaya, ODCB dan OPK	1	Perencanaan Penataan Lingkungan Candi Kotomahligai KCBN Muarajambi	Unit	1	Rp8.545943.000
	2	Penguatan Ekosistem Kebudayaan Berbasis WBTB di KCBN Muarajambi	Unit	1	Rp676.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA

Target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 BPK Wilayah V menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut rincian tingkat ketercapaian kinerja BPK Wilayah V tahun 2023:

Tabel 3.1 Rincian Capaian Kinerja BPK Wilayah V Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	46 Unit	55 Unit	119,57%
[SK 2] Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah	[IKK 2.1] Jumlah Event Kebudayaan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
[SK 3] Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	[IKK 3.1] Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	5 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	120%
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK. 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	91	94,68	104,04%
	[IKK 4.2] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	-	-	-

SK 1

Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Peningkatan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi salah satu prioritas nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yang juga menjadi salah satu prioritas yang termuat pada Renstra Kemendikbudristek. Perjanjian kinerja BPK Wilayah V tahun 2023 mengampu sasaran kegiatan meliputi meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi yang didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi.

Tingkat keberhasilan kinerja BPK Wilayah V pada tahun 2023 didukung dengan adanya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan, optimalisasi, dan strategi-strategi pencapaian dalam realisasi kegiatan khususnya pada indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi yang meliputi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut rincian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan berskala nasional di Wilayah Kerja BPK Wilayah V:

Tabel 3.2 Cagar Budaya Peringkat Nasional dan Warisan Budaya Takbenda di Wilayah Kerja Tahun 2023

Wilayah Kerja	Cagar Budaya Peringkat Nasional	Warisan Budaya Takbenda
Provinsi Jambi	▪ Muarajambi	57
Provinsi Kep. Bangka Belitung	▪ Pesanggerahan Menumbing, dan ▪ Wisma Ranggam Muntok	48
Total	3 Cagar Budaya Nasional (CBN)	105 Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

IKK 1.1

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi sebagai Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala BPK Wilayah V dengan Direktur Jenderal Kebudayaan, dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat output kegiatan yang terukur dan berperan dalam pencapaian keberhasilan indikator kinerja kegiatan BPK Wilayah V Tahun 2023. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ialah mengembangkan sarana dan prasarana di Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi serta melakukan sosialisasi dan publikasi secara masif dan berkelanjutan.

Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU NO. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Lalu perlunya pelestarian sebagai unsur terpenting dalam pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik (*feedback*) pada upaya pelestarian.

Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan, seperti bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lainnya. OPK juga harus memberikan dampak sosial, budaya, ekonomi, dan politik dan mempunyai daya untuk berkembang, dilestarikan (unsur/karya budaya dan pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis budaya, krisis politik, dan krisis ekonomi.

Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi:

Metode Perhitungan:	
Program	: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	: Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
IKK	: Jumlah Cagar Budaya dan warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
Satuan	: Unit
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan
Sumber Data	: Laporan Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi merupakan perlindungan terhadap Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V diwilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023. Alokasi anggaran yang dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi dengan alokasi anggaran sebesar **Rp33.161.880.000,-**.

Pada tahun 2023 BPK Wilayah V mendapatkan anggaran tambahan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) untuk kegiatan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi sebesar **Rp9.221.943.000,-**. Dengan adanya penambahan anggaran BA-BUN dilakukannya revisi penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Kepala BPK Wilayah V TA 2023 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp42.383.823.000,-**.

Berikut penjelasan perbandingan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi TA 2023:

Capaian Kinerja Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2023		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
244 unit	310 Unit	127,40%	46 Unit	55 Unit	119,57%

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Alokasi	Realisasi	Capaian %
Rp42.383.823.000	Rp41.601.800.000	98,15%

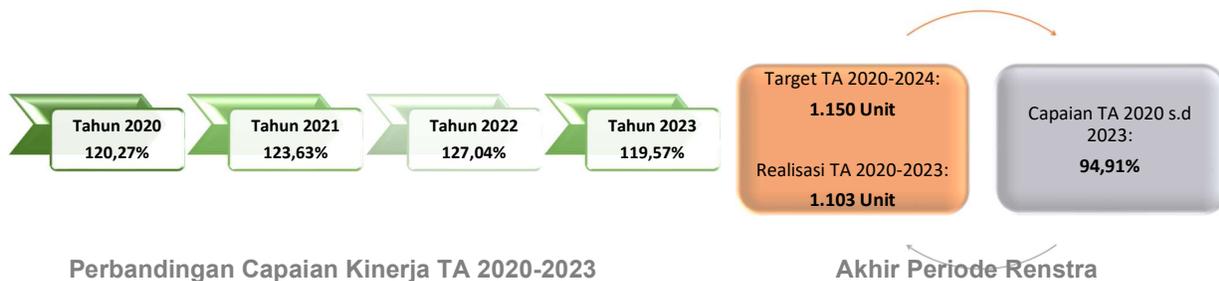
Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi tahun 2023 dicapai persentase capaian **119,57%** dengan target kinerja **46 unit** dan terealisasi **55 unit**. Tingkat keberhasilan capaian kinerja kegiatan didukung dari beberapa kegiatan yang mampu melaksanakan kegiatan melebihi target awal kegiatan dengan memaksimalkan optimalisasi anggaran yaitu pelaksanaan kegiatan Studi Pelindungan Cagar Budaya Parit dan Kolam Kuno KCBN Muarajambi, Studi Objek Pemajuan Kebudayaan Nasional Perang Ketupat di Kab. Bangka Barat, Kep. Bangka Belitung, Inventarisasi Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jambi, Perbaikan Candi Klaster Gumpung-Tinggi KCBN Muarajambi di Wilayah Kerja, dan Pemetaan Arkeologi di Situs KCBN Muarajambi.

Selanjutnya perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 memiliki perbedaan dengan target dan realisasi, dikarenakan pada tahun 2022 satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi yang mencakup empat wilayah kerja yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung, sehingga luasan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi pada tahun 2022 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2023 pada satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V yang mencakup wilayah kerja hanya dua Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.

Pencapaian kinerja realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi tahun 2023 terserap dengan baik sebesar **Rp41.601.800.000,-** dengan persentase capaian **98,15%**, sehingga efisiensi anggaran sebesar **Rp 782.022.083,-** dengan persentase **1,85%**. Efisiensi anggaran didapatkan dari sisa

anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan maupun dioptimalisasi seperti sisa belanja perjalanan dinas pada kegiatan Analisis Pelestarian Warisan Budaya Pendampingan Publik dalam Pengusulan Penetapan Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabutapten dan Kota di Provinsi Jambi, Inventarisasi Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penguatan Ekosistem Kebudayaan Berbasis WBTB di KCBN Muarajambi, serta sisa kontraktual kegiatan Perencanaan Penataan Lingkungan Candi Kotomahligai KCBN Muarajambi (DED).

Gambar 3.1 Analisis Capaian Kinerja TA 2020-2023 dan Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra Tahun 2020-2024 IKK Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi



Target renstra pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi dari tahun 2020-2024 sebanyak **1.150 unit**, selanjutnya capaian target kinerja dari tahun 2020-2023 sudah terealisasi sebanyak **1.103 unit** sehingga persentase capaian pelaksanaan selama 2020-2023 pada pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi sebesar **94,91%**, sisa dari target kinerja sebanyak **47 unit** dengan persentase **5,09%** yang akan dilaksanakan pada target kinerja tahun 2024.

Kegiatan yang mendukung indikator kinerja kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi pada tahun 2023 yang diampu tiga rincian output, berikut kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Perencanaan Penataan Lingkungan Candi Kotomahligai KCBN Muarajambi Provinsi Jambi:

Perencanaan Penataan Lingkungan di Kotomahligai Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi menghasilkan DED (Detail Engineering Design). DED adalah produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana, biasa disebut bestek merupakan sebuah gambar bangunan yang lengkap dan detail yang digunakan sebagai dokumen utama dari perencanaan penataan lingkungan di Kotomahligai KCBN Muarajambi. Konsep perencanaan penataan lingkungan ini diharapkan akan memberikan landasan dari proses berikutnya yang lebih aplikatif, terutama pada ranah perencanaan dan pengelolaan situs/kawasan. Konsep penataan yang komprehensif yang melibatkan faktor-faktor fisik, lingkungan, manusia, dan budaya menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dari situs/kawasan cagar budaya berikutnya. Pelaksanaan Perencanaan Penataan Lingkungan Candi Kotomahligai KCBN Muarajambi Provinsi Jambi, salah satunya pelaksanaan pemetaan Topografi, Geolistrik dan Fotogrametri guna sebagai acuan penyusunan Perencanaan Penataan Lingkungan Candi Kotomahligai KCBN Muarajambi.



Foto 1. Persiapan Kegiatan Pemetaan Topografi di Situs Candi Kotomahligai KCBN Muarajambi salah satu pelaksanaan Perencanaan Penataan Lingkungan



Foto 2. Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Topografi Candi Astano KCBN Muarajambi

2. Penguatan Ekosistem Kebudayaan Berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan (WBTB) di KCBN Muarajambi Provinsi Jambi:

Pelaksanaan kegiatan Ekosistem Kebudayaan Berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan (WBTB) di KCBN Muarajambi Provinsi Jambi bertujuan mendapatkan wawasan terhadap tata kelola/manajemen berbasis OPK terhadap UMKM, pembuatan produk-produk UMKM, mendapatkan pengetahuan dari narasumber terkait pengelolaan UMKM yang terdapat di Pasar Papringan Temanggung, Pasar Keramat Mojokerto dan di sekitar Candi Borobudur, dan peran serta komunitas, dan mengetahui proses pelaksanaan even Pasar Papringan. Berikutnya hasil dari pelaksanaan kegiatan ini anggota UMKM Paduka dapat mengambil manfaat dari kegiatan tersebut serta dapat mengaplikasikannya di Paduka dengan mengkombinasikan dengan kearifan lokal serta dengan kondisi lingkungan di KCBN Muarajambi, anggota UMKM Paduka berhasil menampilkan dan memunculkan produk-produk unggulan lokal Desa Muarajambi berbasis OPK, sehingga dapat memberikan dampak signifikan.



Foto 3. Pelaksanaan Pengembangan Tim UMKM Paduka berbasis OPK KCBN Muarajambi terkait Manajemen dan Operasional UMKM



Foto 4. Kunjungan UMKM Paduka berbasis OPK KCBN Muarajambi ke Pasar Papringan untuk melihat persiapan pasaran di lokasi Pasar Papringan



Foto 5. Praktek membatik di UMKM Batik Tulis Dewi Wanu, Borobudur



Foto 6. Praktek membuat wayang suket (kiri) dan Praktek melukis gerabah (kanan) oleh anggota UMKM Paduka

3. Pembebasan Lahan di KCBN Muarajambi Provinsi Jambi:

Pembebasan Lahan dilaksanakan dengan metode pengadaan tanah secara swakelola. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi kompensasi berupa ganti kerugian yang layak dan adil. Tujuan pembebasan lahan adalah sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap Situs-Situs Cagar Budaya yang terdapat di dalamnya dan untuk menjadikan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi sebagai Pusat Pengetahuan Kebudayaan Nusantara serta untuk mendukung rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya Muarajambi sebagai sebuah destinasi dunia. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus melalui 4 (empat) tahap, yaitu: Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyerahan Hasil. Pembebasan lahan berlokasi di Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dititik lokasi akses jalan primer/pintu masuk untuk Museum KCBN Muarajambi yang akan di bangun pada Tahun 2024.



Foto 7. Proses Pengukuran Lahan yang akan dibebaskan di KCBN Muarajambi

4. Penangan Temuan ODCB di Wilayah Kerja:

- Kegiatan Peninjauan Kasus Pengangkatan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Sungai Batanghari, Suak Kandis Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi: Penanganan kasus oleh oknum pencarian ODCB di Sungai Batanghari telah banyak muncul dimedia cetak maupun elektronik. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga telah membentuk Tim gabungan bernama Tim Pelestarian Objek Diduga Cagar Budaya kabupaten Muaro Jambi. Namun pengangkatan ODCB semakin marak dengan jumlah perahu yang mencapai puluhan. Ada yang menyebutkan lebih dari 100 perahu. Tim gabungan berhasil menyita sejumlah benda yang berupa keramik, koin cina, dan benda lainnya pada operasi yang dilakukan bulan Desember 2022. Penangkapan yang dilakukan Polres Muaro Jambi sekitar bulan Juli 2023 menyita benda-benda logam, termasuk benda terbuat dari emas di dalam karung 10 kg. Tetapi, warga yang menjadi pemodal dan penyelam dari luar jambi masih beroperasi tanpa penindakan. Tujuan kegiatan ini ialah Mengidentifikasi permasalahan pengangkatan ODCB di Suak Kandis, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dan memperjelas tindak lanjut dari koordinasi penanganan kasus pengangkatan ODCB terhadap instansi terkait maupun masyarakat.



Foto 8. Lokasi Suak Kandis, Kecamatan Kumpeh (kiri) dan Koordinasi ke Polairud Polda Jambi (kanan)

- Kegiatan Peninjauan ODCB di Perairan Pulau Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Kegiatan Peninjauan Temuan Objek Diduga Cagar Budaya di Perairan Pulau Bangka diawali dengan kegiatan koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok. Tujuan koordinasi melakukan pendalaman informasi dengan cara pengumpulan data keterangan perihal pengangkatan komponen bagian dari kapal tenggelam di Perairan Selat Bangka. Hasil pengumpulan data dan informasi serta peninjauan langsung pengangkatan fragmen logam bagian kapal tenggelam di Kapal Water Dragon dapat disimpulkan: - PT Damai Sekawan Marine melakukan pembersihan alur pelayaran tidak sesuai titik koordinat hasil rekomendasi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok, dan hasil dari peta pelayaran navionics yang juga dipakai oleh hidros, maka hanya ada satu penanda shipwreck di barat Pulau Nangka, dimana penanda ini juga memiliki kesamaan dengan lokasi titik koordinat 02°22'738" S dan 105°43'536" E, sehingga terdapat kemungkinan lokasi ini merupakan lokasi tenggelamnya Kapal Norah Moller.



Foto 9. Peninjauan terhadap benda kapal tenggelam



Foto 10. Temuan Benda kapal tenggelam

5. Pemetaan dan Ekskavasi Situs Makam Siti Hawa Kabupaten Tanjabtumur Provinsi Jambi:

Pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Ekskavasi Situs Siti Hawa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi adalah memperoleh sebaran komponen Situs Siti Hawa yang masih memiliki konteks kebudayaan yang sama beserta batasan-batasan yang jelas dan akurat, sehingga pelestariannya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai satu situs yang utuh, melengkapi data dukung dalam upaya penetapan Situs Siti Hawa sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lokasi kegiatan Pemetaan dan ekskavasi dilakukan di Situs Siti Hawa yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil kegiatan pemetaan dan ekskavasi yang dilakukan, hasilnya dapat diketahui bahwa Situs Sitihawa memiliki potensi arkeologis yang cukup besar, karena; (a) sejak ditemukan pada tahun 1993 hingga 2023 (saat ini) masih ditemukan banyak sekali artefak yang tersebar di area situs, (b) temuan-temuan artefaktual yang terdapat di wilayah situs cukup beragam dari segi jenis bentuk, bahan, fungsi, dan karakteristiknya, namun pada umumnya mayoritas memiliki kondisi yang terfragmentarisasi. Mulai dari tembikar, terakota, stoneware, alat kayu, hingga keramik China. Temuan yang paling signifikan adalah pecahan keramik yang secara keseluruhan berasal dari masa Dinasti Sung abad ke IX-XII, (c) hasil survei menunjukkan bahwa sebaran temuan di Situs Sitihawa cenderung bergerak dari wilayah pusat (makam tua) ke arah barat, selatan, dan barat daya situs, dengan konsentrasinya berada di sisi selatan dan barat daya. Sementara pada area timur dan utara hanya terdapat sedikit saja temuan-temuan arkeologisnya.



Foto 11. Survei lapangan di Situs Sitihawa dan sekitarnya



Foto 12. Peta Situasi Situs Sitihawa, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi

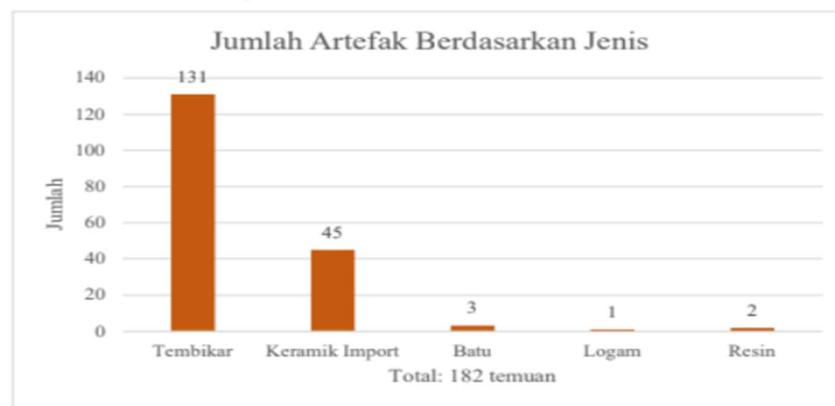


Foto 13. Jenis dan jumlah artefak dari kotak ekskavasi di Situs Sitihawa dan beberapa hasil temuan berupa tembikar dan pecahan keramik

6. Pemetaan Arkeologi di Situs KCBN Muarajambi Provinsi Jambi:

Pelaksanaan Pemetaan Arkeologi di Situs KCBN Muarajambi mendukung pembuatan dokumen perencanaan penataan lingkungan yang akan dibangun berupa fasilitas penunjang di sekitar situs yang akan dilaksanakan pembangunannya pada Tahun 2024. Selanjutnya untuk menghindari kerusakan data arkeologis sebagai dampak pembuatan prasarana dan sarana penunjang yang ada di Situs, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa rencana penataan lingkungan berupa prasarana dan sarana penunjang di KCBN Muarajambi yang tidak berada di area yang terdapat cagar budaya yang akan dilestarikan. Metode pelaksanaan kegiatan berupa Ekskavasi/ Kotak uji setiap kotak ekskavasi bertujuan khusus

untuk melakukan pemeriksaan tinggalan arkeologis pada lokasi yang akan menjadi area penataan lingkungan di wilayah situs. Lokasi ekskavasi tepat berada pada setiap interval dari lintasan area penataan yang tertuang dalam peta titik ekskavasi. Dengan demikian, pembukaan satu kotak ekskavasi seluas 1 m² pada titik ini nantinya diharapkan dapat merepresentasikan potensi arkeologis pada radius 50 meter di sekeliling kotak. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 lokasi yaitu:

1) Test Pit di Area Situs Candi Kotomahligai:

Pekerjaan tes pit arkeologi untuk memeriksa potensi arkeologis pada area yang akan dilakukan penataan lingkungan dan pembangunan fasilitas berhasil melaksanakan ekskavasi sebanyak 54 kotak. Data yang terhimpun meliputi indikasi struktur atau bangunan serta temuan berupa artefak yang dapat menjadi parameter rekomendasi langkah selanjutnya.

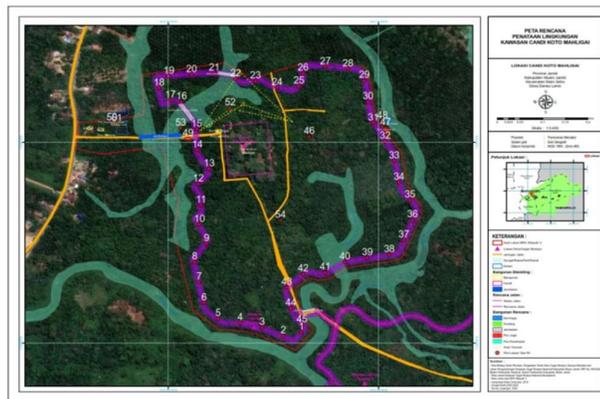


Foto 14. Peta tumpang susun foto udara dengan titik tes pit arkeologi di Kawasan Candi Kotomahligai



Foto 15. Hasil akhir kotak ekskavasi TP-KTM 3 menunjukkan indikasi temuan arkeologis yang berlokasi ±10 m dari Menapo Ujung Tanjung (kiri), dan Temuan artefak kotak ekskavasi TP-KTM 3 (kanan)

2) *Test Pit* di Area Situs Candi Kedaton:

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian untuk memastikan bahwa lokasi yang akan dijadikan lokasi perencanaan penataan lingkungan dan pembuatan fasilitas penunjang tidak berada pada area yang mengandung potensi arkeologis. Sasaran kegiatan ini adalah melakukan pengujian terhadap 36 kotak ekskavasi untuk mengidentifikasi gejala temuan arkeologis yang terkandung di dalamnya. Hasil ekskavasi terhadap kotak uji sebagian besar tidak menunjukkan adanya gejala temuan arkeologis berupa struktur bata intak dan kepadatan temuan artefaktual. Sebagian yang lainnya menunjukkan area yang tidak ditemukan gejala arkeologis.

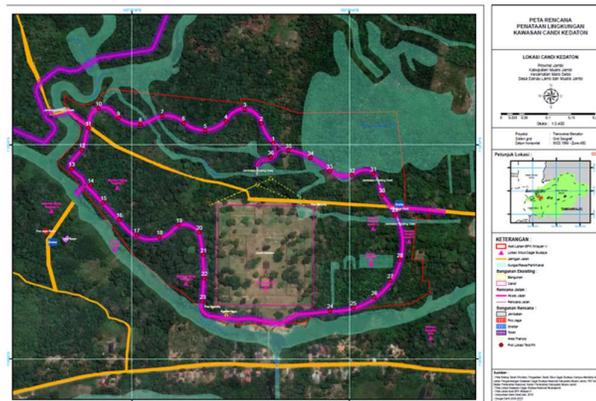


Foto 16. Peta Tumpang Susun Foto Udara dengan Titik Test pit Arkeologi di Kawasan Candi Kedaton



Foto 17. Hasil akhir kotak ekskavasi TP-KDT 36 menunjukkan indikasi temuan arkeologis berupa Fregmen Bata berwarna coklat kemerahan pada permukaan kotak ekskavasi

3) *Test Pit* di Area Situs Candi Paritduku-Candi Gedong I:

Pekerjaan tes pit arkeologi untuk memeriksa potensi arkeologis pada area yang akan dilakukan penataan lingkungan dan pembangunan fasilitas berhasil melaksanakan ekskavasi sebanyak 35 kotak ekskavasi. Hasil dari pelaksanaan ekskavasi terindikasi temuan struktur bata pada kotak ekskavasi salah satunya kotak ekskavasi TP-KTM 7, selanjutnya temuan berupa artefaktual salah satunya kotak ekskavasi TP-KTM 3. Dapat

disimpulkan bahwa secara umum dijumpai dua hasil utama dari kegiatan ini yaitu bahwa terdapat kotak ekskavasi yang memiliki indikasi arkeologi seperti tersebut di atas dan area selain kotak ekskavasi dimaksud yang merupakan area dapat dilanjutkan dengan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang.

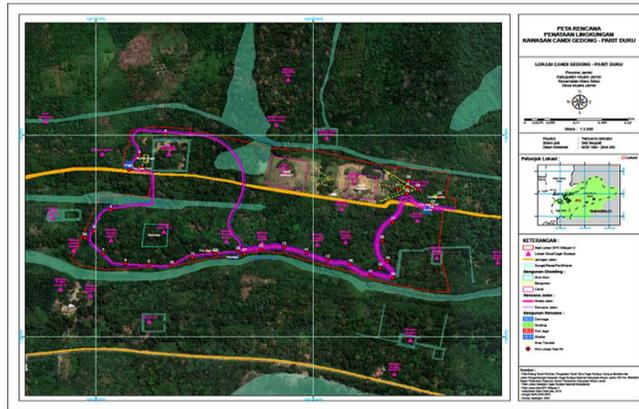


Foto 18. Peta Tumpang Susun Foto Udara dengan Titik Test pit Arkeologi di Kawasan Candi Paritduku-Candi Gedong I



Foto 19. Hasil akhir kotak ekskavasi TP-KTM 38 menunjukkan indikasi temuan arkeologi berupa artefak



Foto 20. Temuan artefak kotak ekskavasi TP-KTM 38

4) *Test Pit* di Area Situs Candi Astano:

Kegiatan *test pit* adalah bahwa aktivitas pembangunan fasilitas dan infrastruktur di lingkungan Candi Astano dan sekitarnya dapat dilakukan, karena berdasarkan hasil *ground checking* yang dilakukan tidak terdapat satupun temuan arkeologis yang signifikan. Meskipun begitu, kegiatan pembangunan khususnya yang berkaitan aktivitas di permukaan maupun di dalam tanah tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek pelestarian mengingat wilayah sekitarnya masih masuk ke dalam zona inti.



Foto 21. Peta Tumpang Susun Foto Udara dengan Titik Test Pit Arkeologi di Kawasan Candi Astano



Foto 22. Hasil akhir kotak ekskavasi TP-KTM 25 menunjukkan indikasi temuan arkeologi berupa artefak

5) *Test Pit* di Area Lahan Pembangunan Museum KCBN Muarajambi

Kegiatan *test pit* arkeologi yang dilakukan pada lokasi Pembangunan Museum KCBN Muarajambi bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya struktur cagar budaya pada lokasi tersebut. Berdasarkan hasil ekskavasi dari 34 kotak *test pit*, tidak ditemukan adanya struktur intak yang mengindikasikan keberadaan struktur cagar budaya. Artefak bata yang ditemukan merupakan temuan lepas yang tidak berasosiasi dengan struktur cagar budaya. Artefak lain yang ditemukan adalah fragmen keramik dan fragmen besi, di TP 23

dan TP 24. Selain dari kotak tersebut, tidak ditemukan artefak ataupun struktur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum lokasi tersebut merupakan area yang dapat dilanjutkan dengan kegiatan pembangunan museum KCBN Muarajambi serta fasilitas penunjang lainnya.

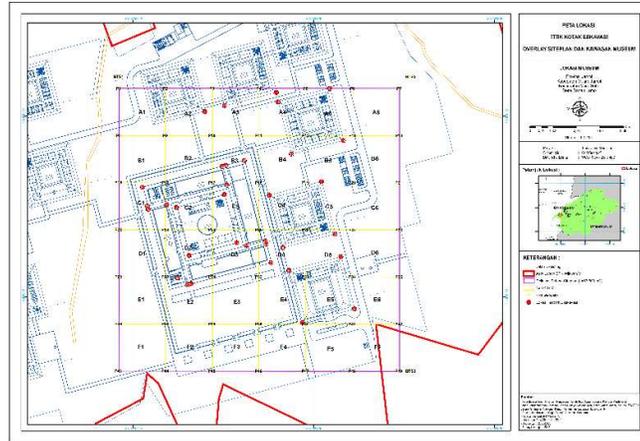


Foto 23. Peta Tumpang Susun Rencana Pembangunan Museum dengan Titik Tes Pit Arkeologi



Foto 24. Hasil akhir kotak ekskavasi TP-24 tidak ada indikasi temuan arkeologi

7. Pemugaran Cagar Budaya Nasional Pesanggrahan Menumbing Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Kegiatan pemugaran Pesanggrahan Menumbing merupakan upaya perlindungan cagar budaya, sebagai bagian dari upaya Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Nasional Pesanggrahan Menumbing pada Paviliun 1, Paviliun 2, dan Kamar Nomor 4 bertujuan untuk mengembalikan tata ruang mikro pada bangunan tersebut setelah pada waktu sebelumnya banyak perubahan karena pemanfaatan bangunan sebagai hotel/penginapan. Pekerjaan pemugaran ini merupakan pengembalian arsitektural bangunan pada bagian fasade yang telah banyak berubah dan tata letak di dalam bangunan.

Pengembalian ke bentuk awal dilakukan dengan studi literatur memanfaatkan dokumentasi lama, baik pada masa pengasingan tokoh-tokoh nasional, maupun dokumentasi pada masa awal pembangunan Pesanggrahan Menumbing di tahun 1928 dan 1931. Denah di dalam bangunan diketahui dari pengamatan langsung dan dengan cara penelusuran pada dinding asli, yaitu dengan mengelupas lapisan plester dinding. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan juga penataan lingkungan di sekitar bangunan dengan penanaman rumput di sekeliling bangunan yang dipugar.



Foto 25. Bangunan Paviliun 1 sebelum di pugar (kiri) dan sesudah di pugar (kanan)



Foto 26. Bangunan Paviliun 2 sebelum di pugar (kiri) dan sesudah di pugar (kanan)



Foto 27. Bangunan Paviliun Kamar No.4 sebelum di pugar (kiri) dan sesudah di pugar (kanan)

8. Perbaikan Candi Klaster Gumpung-Tinggi KCBN Muarajambi Provinsi Jambi

Candi Gumpung, Candi Tinggi, dan Candi Tinggi 1 merupakan Cagar Budaya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/M/2013 sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi. Secara administrasi kewilayahan Candi Gumpung, Candi Tinggi, dan Candi Tinggi I terletak di D riwayat pemugaran kompleks Candi Gumpung dilakukan selama tujuh tahun, yaitu dari tahun 1982 hingga tahun 1988. Pekerjaan pemugaran dalam kurun waktu tersebut meliputi candi induk, lima buah gapura, pagar keliling, pagar pembagi dalam/sekat ruang candi, sedangkan mandapa Candi Gumpung telah dipugar pada tahun 1993.esa Muara Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Candi Tinggi dan Candi Tinggi 1 juga dibatasi oleh pagar keliling berukuran 92 x 75 meter berbentuk persegi panjang. Candi Tinggi memiliki 2 buah gapura, yaitu gapura di sebelah barat dan timur. Gapura di sebelah timur berukuran lebih besar daripada yang di barat. Gapura di sebelah timur ini diperkirakan sebagai gapura untuk akses menuju ke pelataran Candi Tinggi. Selama kurun waktu sepuluh tahun, yaini 1978 hingga 1987 Candi Tinggi telah dipugar. Pekerjaan pemugaran dalam kurun waktu sepuluh tahun ini antara lain meliputi aspek penelitian arkeologi, perkuatan konstruksi, konservasi, serta upaya-upaya mengembalikan bentuk arsitektur setiap bangunan yang masih tersisa seperti cetiyaghara, mandapa, gapura, pagar keliling dan lima buah perwara dengan berbagai ukuran.

Namun demikian pada bagian gapura sebelah timur dan mendapa belum dipugar seutuhnya. Mandapa Candi Tinggi telah dipugar hanya bagian kakinya saja atau pondasi, sehingga bata isian masih terlihat dan tidak dilakukan perkuatan konstruksi. Kondisi demikian selain terlihat tidak rapi juga sangat rentan rusak sebagai akibat dari aktivitas pengunjung menaiki struktur tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan Pemugaran Candi Gumpung, Candi Tinggi, dan Candi Tinggi 1 adalah untuk mengembalikan struktur bangunan candi yang mengalami kerusakan dengan berpedoman kepada prinsip keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknis pengerjaan yang dilakukan secara parsial maupun secara keseluruhan. Dengan demikian dapat menghindarkan kerusakan fisis dan memperpanjang usianya.



Foto 28. Mandapa Candi Tinggi Sebelum (kiri) dan Sesudah (kanan) di Pugar



Foto 29. Struktur 1 Candi Tinggi I Sebelum (kiri) dan Sesudah (kanan) di Pugar



Foto 30. Struktur 2 Candi Tinggi I Sebelum (kiri) dan Sesudah (kanan) di Pugar

1. Studi Pelindungan Cagar Budaya Bawah Air di Pulau Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perairan Pulau Belitung memiliki potensi tinggalan arkeologi bawah air yang besar. Namun, tinggalan tersebut tidak seluruhnya terekam dan terjaga dengan baik. Dari data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, telah terjadi beberapa tindakan pengangkatan tanpa izin, sehingga di butuhkan strategi pelindungannya. Adapun dari 8 titik lokasi yang berhasil dihimpun di perairan Pulau Penanas, perairan Pulau Bakau, perairan Pulau Berlian, dan perairan Pulau Keran. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan pelindungan terhadap lokasi tinggalan arkeologi bawah air. Situs bawah air sebagai lokasi yang sarat dengan benda-benda muatan kapal tenggelam sudah semestinya dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Potensi Kapal Tenggelam dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang mengandung berbagai aspek kehidupan masa lampau sudah selayaknya dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sehingga diperlukan upaya-upaya pengelolaan yang lebih serius.



Foto 31. ODCB/Artefak hasil temuan di perairan Belitung Timur, saat ini tersimpan di Galeri Maritim Kota Manggar



Foto 32. ODCB bawah air Pulau Penanas berupa sebaran keramik pada kedalaman ±25 meter (kiri) dan ODCB bawah air Pulau Bakau berupa keramik pada kedalaman ±24 meter (kanan)

2. Studi Pelindungan Cagar Budaya Parit dan Kolam Kuno KCBN Muarajambi Provinsi Jambi

Pelaksanaan kegiatan tersebut berupa bservasi lapangan dilakukan dengan menggunakan bor tangan (*hand-auger*), pembuatan sumuran (*test pit*) dan paritan (*trench*). Pengamatan dilakukan untuk mengenali keberadaan horizon-horison lapisan arang, fragmen bata, gerabah/keramik. Hasil pengamatan ini akan digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan posisi permukaan dan/atau kedalaman dasar lingkungan perairan yang diteliti pada masa percandian. Pengamatan dilakukan di 48 titik yang tersebar di 11 lokasi yaitu Buluran Tiang, Kolam Sangkar Ikan, Kolam Sangkar Ikan Kecil, Menapo Alun-Alun, Kolam Telago Rajo 2, Parit Buluh, Saluran Utara-Selatan Timur Kedaton, Kolam Kedaton, Candi Gumpung, Candi Gedong dan Candi Astano.

Hasil dari keseluruhan kegiatan di ketiga area tersebut telah berhasil digali 15 kotak uji dan pemboran tangan di 21 titik pemboran tangan. Kegiatan yang berhasil dilakukan di Area Parit Buluh, Kolam Kedaton, Kolam Sangkar Ikan, dan Parit Situs Kedaton berjumlah sepuluh kotak uji dan 6 titik pemboran tangan. Kegiatan yang dilakukan di Area Kanal Parit Duku berhasil digali empat kotak uji dan 8 titik pemboran tangan. Sementara itu, kegiatan di Area Kolam Telagorajo 2 berhasil menggali satu Kotak Uji dan 7 titik pemboran tangan.

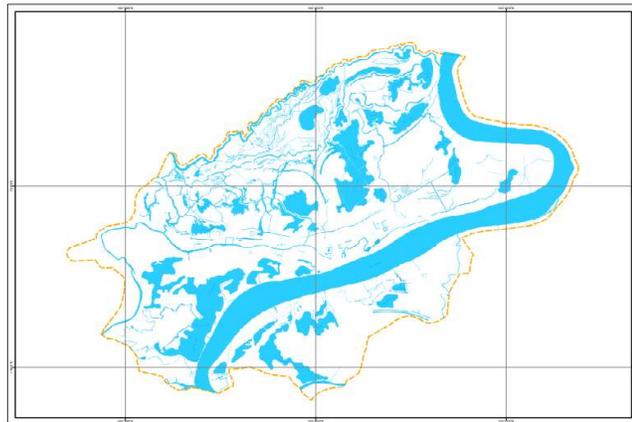


Foto 33. Peta Perairan Sungai KCBN Muarajambi



Foto 34. Pelaksanaan Ekskavasi dan beberapa temuan dari kotak ekskavasi berupa temuan fragmen keramik

3. Studi Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Pelaksanaan kegiatan Studi Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa observasi lapangan dan *Focus Group Discussion* yang dilakukan tim telah mengidentifikasi permasalahan dalam pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya (CB). Adapun poin-poin permasalahan yang telah dipetakan tersebut ialah Identifikasi Permasalahan Umum, Identifikasi Permasalahan pada pelaksanaan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan Identifikasi Permasalahan pada pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya. Hasil dari kegiatan ini telah dipetakan terbagi atas 3 bidang penting yaitu; Regulatif, Teknis, dan Administrasi. Rekomendasi yang bersifat regulatif umumnya memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan disusun kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang telah didiskusikan bersama. Rekomendasi yang bersifat teknis dapat berupa tindakan-tindakan langsung yang dapat menyesuaikan dengan kapabilitas pemerintah daerah. Kemudian rekomendasi yang bersifat administratif dapat berupa pendukung secara legal formal, maupun dukungan secara materi, dari pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.



Foto 35. Pemaparan materi pada Sesi I dengan Tema Pelindungan Cagar Budaya oleh Bapak DR. Junus Satrio Atmodjo (kiri), dan Pemaparan materi pada Sesi II, Pelindungan Cagar Budaya, oleh Sekretaris Tim Penilai WBTB Nasional oleh Bapak Toto Sucipto (kanan).



Foto 36. Foto bersama dengan para peserta FGD

4. Studi Pemajuan dan Kebudayaan WBTB Nasional Perang Ketupat di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Perang Ketupat salah satu yang telah ditetapkan menjadi WBTB Nasional yang merupakan ritual yang masih sangat mungkin dikembangkan dan berdampak lintas sektoral, tentunya hal itu bisa terwujud jika ada kesadaran dan komitmen bersama antara masyarakat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Di dalam koordinasi persiapan Perang Ketupat ada beberapa perlu pendalaman detail kegiatan karena belum ada kesepakatan rencana Perang Ketupat Tahun 2024 dan perlu ada rapat melalui luring maupun daring sebelum pelaksanaan kegiatan untuk menentukan rencana pendukung kegiatan Perang Ketupat dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V. Rencana pendukung hasil koordinasi persiapan Perang Ketupat antara pembuatan Stand UMKM menggunakan bahan bambu, pembuatan gapura menggunakan bahan bambu di dalam area perang ketupat, pembuatan perahu acara Nganyot perau, pembuatan pedoman penyajian kuliner dengan makanan tradisional yang menggunakan dulang dan tudung saji dengan menggunakan tanpa bahan kemasan plastik seperti minuman kemasan diganti dengan gelas bambu atau gelas “blirik”, penguatan dalam tradisi, tempat sampah menggunakan bahan kulit bamboo atau rotan, pengecatan dinding bangunan yang bergambar tokoh kartun dan pembuatan pendokumentasian kegiatan Perang Ketupat.



Foto 37. Pelaksanaan Perang Ketupat Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat

5. Pendampingan Publik dalam Pengusulan Penetapan Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabutapten dan Kota di Provinsi Jambi

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Publik dalam Pengusulan Penetapan Cagar Budaya (CB) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi merupakan bentuk dukungan dari BPK Wilayah V untuk mendampingi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengusulan penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota yang berada di daerahnya, mendata serta mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam upaya pengusulan penetapan cagar budaya untuk tahun 2023 maupun tahun berikutnya, mendata upaya pelestarian cagar budaya yang sudah dilakukan dan upaya agar peran serta pemerintah daerah setempat terhadap cagar budaya lebih maksimal, dan menyusun rekomendasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.



Foto 38. Koordinasi dan Sosialisasi Pendampingan Pengusulan Penetapan CB di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh



Foto 39. Masjid Pondok Tinggi yang termasuk Cagar Budaya yang berada di Kota Sungai Penuh

1. Inventarisasi Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan inventarisasi warisan budaya Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di Kabupaten Bangka Barat untuk menggali potensi budaya yang masih ada sebagai warisan budaya masyarakat dulu, sekarang dan yang akan datang yang merujuk kepada 10 objek pemajuan kebudayaan Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017. Tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan.

Berdasarkan temuan di lapangan, OPK yang paling menonjol Kabupaten Bangka Barat adalah yang menyangkut jenis adat istiadat, manuskrip, dan cagar budaya. Menonjolnya jenis OPK manuskrip dan cagar budaya berkaitan dengan eksploitasi sumber timah pada masa kolonial Belanda. Bangunan peninggalan Belanda yang terkait dengan penambangan timah, termasuk situs Kawasan Cagar Budaya Kota Tua Muntok Lama, Situs Benteng Kota

Tempilang, Museum Timah yang menyimpan benda-benda cagar budaya.

Cagar budaya lainnya yang juga sangat terkenal di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung adalah segala hal yang terkait dengan diasingkannya tokoh proklamator Indonesia, Soekarno-Hatta, di kawasan ini, yaitu Pesanggrahan Menumbing. Semua cagar budaya tersebut sudah mendapatkan penanganan dari pihak-pihak terkait bahkan sebagian di antaranya sudah dilakukan kajian yang melibatkan kalangan akademik, seperti penelitian beberapa universitas di Kawasan Cagar Budaya Kota Tua Muntok Lama.



Foto 40. Penyalaan Api tujuh lingkur merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan pada hari ke 27 bulan Ramadhan sebagai wujud rasa syukur masyarakat dalam menjalani bulan Ramadhan



Foto 41. Alat Musik Gong Tawak-tawak merupakan salah satu instrument alat musik tradisional khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih dimainkan untuk perhelatan adat maupun pada resepsi perkawinan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.



Foto 42. Kain Cual atau Kain Besusur Bangka Barat merupakan khas dari kaum wanita keturunan Ence'Wan Abdul Hidayat dari Siantan yang memiliki keahlian menenun.

2. Inventarisasi Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jambi

Kegiatan inventarisasi warisan budaya Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di Kabupaten Bangka Barat untuk menggali potensi budaya yang masih ada sebagai warisan budaya masyarakat dulu, sekarang dan yang akan datang yang merujuk kepada 10 objek pemajuan kebudayaan Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017. Tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Berdasarkan hasil kajian Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan kateristik karakteristik lokasi dari Provinsi Jambi yang berada pada wilayah dataran dan dikelilingin aliran sungai Batanghari, maka karya budaya yang ada di lingkungan masyarakat lebih banyak kepada kajian aquatik sehingga kebanyakan karya budaya lebih banyak menghasilkan budaya masyarakat sungai.



Foto 43. Sadokah Godang/ Sadokah Nagori adalah pesta adat suku Melayu Jambi yang berada di Kabupaten Tebo yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam rangka menyambut tamu agung, seperti pejabat pemerintah (Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, dan lain-lain) maupun tokoh masyarakat.



Foto 44. Nasi Ibat gulai Tuntum merupakan makanan tradisional yang disajikan pada saat digelarnya Sadokah Godang, baik saat pesta penyambutan tamu agung maupun pesta pernikahan tradisi masyarakat suku Melayu Jambi Kabupaten Tebo.

BPK Wilayah V dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan saat melaksanakan kegiatan, berikut penjelasan hambatan beserta upaya/strategi yang di lakukan BPK Wilayah V dalam melaksanakan indikator kinerja kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi:

NO	HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPASI	UPAYA/STRATEGI
1	Kegiatan sedikit terhambat dengan <i>timeschedule</i> yang di susun di awal tahun di karenakan DIPA atas perubahan struktur organisasi yang semula Satker BPCB Provinsi Jambi menjadi BPK Wilayah V terbit per tanggal 26 Mei 2023.	Melakukan penyusunan strategi pencapaian kegiatan atas perubahan program/kegiatan satker BPK Wilayah V.	Melakukan perubahan <i>timeschedule</i> kegiatan TA 2023 selaras dengan pelaksanaan pendukung kegiatan intansi dan <i>stakeholder</i> .

NO	HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPASI	UPAYA/STRATEGI
2	Terdapat sisa anggaran kegiatan yang sudah terlaksana dengan persentase yang cukup besar.	Memaksimalkan daya serap pelaksanaan anggaran dengan optimal berbasis output dan <i>outcome</i> .	Melakukan optimalisasi anggaran, guna dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat urgensi dan strategi persiapan pelaksanaan kegiatan TA 2024.
3	DIPA BA-BUN terbit per 28 September 2023 untuk di kegiatan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi ,sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai dengan <i>actionplan</i> serta <i>timeschedule</i> yang sudah dirancang dengan rentan waktu bulan Mei s.d November 2023.	Melakukan strategi capaian kinerja yang optimal dengan penyusunan <i>actionplan</i> dan <i>timeschedule</i> sasaran kegiatan tanpa mengurangi <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari pelaksanaan kegiatan.	Penyesuaian dan perubahan strategi <i>actionpan</i> serta <i>timeschedule</i> yang dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Oktober s.d Desember 2023
4	Keterbatasan Sumber Daya Manusia internal kantor untuk melaksanakan kegiatan nilai budaya.	Melakukan pelatihan teknis khusus kepada Sumber Daya Manusia internal kantor, dan menjalankan kerjasama yang baik antara masyarakat lokal, instansi terkait serta <i>stakeholder</i> .	Merekrut tenaga teknis dan masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang berkompeten dan profesional,dan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten dan profesional sesuai dengan bidangnya serta Instansi Pemerintah Pusat Daerah serta <i>Stakeholder</i> .

SK 2

Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah

Peningkatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah salah satu prioritas nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yang juga menjadi salah satu prioritas yang termuat pada Renstra Kemendikbudristek. Perjanjian kinerja BPK Wilayah V tahun 2023 mengampu sasaran kegiatan meliputi meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah yang didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Event Kebudayaan Daerah.

Tingkat keberhasilan kinerja BPK Wilayah V pada tahun 2023 didukung dengan adanya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan, optimalisasi, dan strategi-strategi pencapaian dalam realisasi kegiatan khususnya pada indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah event kebudayaan daerah yang meliputi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi,dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

IKK 2.1

Jumlah Event Kebudayaan Daerah

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi; dan
7. Dimensi kesetaraan gender.

Dalam dimensi ekonomi budaya terdapat indikator Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 15 tahun keatas. Kegiatan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukkan musik, pameran seni (antara lain lukis/patung/fotografi/kriya), wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Pelaku/pendukung pertunjukkan/pameran meliputi antara lain penari, pemain peran, pemain musik, dan perupa. Sumber penghasilan yang dimaksud adalah penduduk menerima upah/imbalan dari perannya dalam pertunjukan tersebut, baik berupa uang ataupun bentuk yang lain.

Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif melakukan pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai (Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah satu tujuan dari Pemajuan Kebudayaan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pasal 4, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pada definisi operasional Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Event Kebudayaan merupakan event Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan cq Balai Pelestarian Kebudayaan Event merupakan perhelatan seni dan/atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival, pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan.

Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 3.2.1.3 Jumlah event kebudayaan daerah:

Metode Perhitungan:	
Program	: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	: Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah
IKK	: Jumlah event kebudayaan daerah
Satuan	: Kegiatan
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Sumber Data	: Laporan Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah merupakan event Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V di wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023. Alokasi anggaran yang dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah sebesar **Rp 650.000.000,-**.

Berikut penjelasan perbandingan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah TA 2023:

Capaian Kinerja Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2023		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
-	-	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Alokasi	Realisasi	Capaian %
Rp650.000.000	Rp621.033.713	95,54%

Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah tahun 2023 dicapai persentase capaian **100%** dengan target kinerja **4 kegiatan** dan terealisasi **4 kegiatan**. Tingkat keberhasilan capaian kinerja kegiatan didukung dari beberapa kegiatan yang mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023.

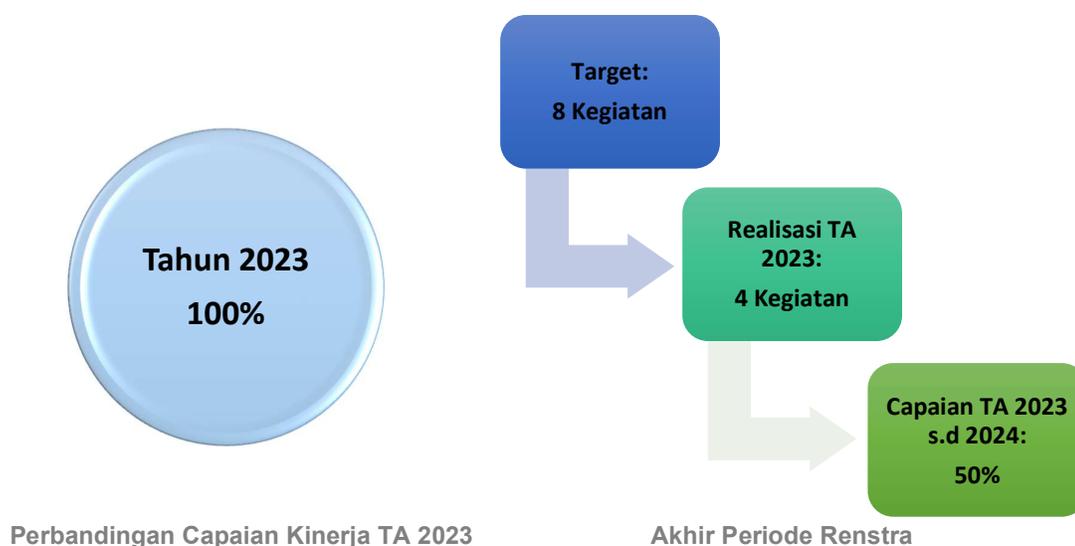
Pencapaian kinerja realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah tahun 2023 terserap dengan baik sebesar **Rp621.033.713,-** dengan persentase capaian **95,54%**, sehingga efisiensi anggaran sebesar **Rp 28.966.287,-** dengan persentase **4,46%**. Efisiensi anggaran didapatkan dari sisa anggaran dari setiap kegiatan yang

telah dilaksanakan maupun dioptimalisasi seperti sisa belanja perjalanan dinas dan belanja bahan pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah tidak termasuk di perjanjian kinerja kepala, dikarenakan Indikator Kinerja Kegiatan ini dilaksanakan saat perubahan struktur organisasi dari satker BPCB Provinsi Jambi menjadi BPK Wilayah V, sehingga pada laporan kinerja TA 2023 khususnya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah tidak bisa diperbandingkan.

Hasil dari perubahan Reviu Renstra BPK Wilayah V untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah memiliki target 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Gambar 3.2 Analisis Target Kinerja TA 2023-2024 dan Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra s.d Tahun 2024 pada IKK Jumlah Event Kebudayaan Daerah



Target renstra pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah tahun 2023 – 2024 sebanyak **8 Kegiatan**, selanjutnya capaian target kinerja tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak **4 Kegiatan**, sehingga persentase capaian pelaksanaan selama 2023-2024 pada pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah sebesar **50 %**. Sisa dari target renstra sebanyak **4 kegaitan** dengan persentase **50%** yang akan dilaksanakan pada target kinerja tahun 2024.

Kegiatan yang mendukung indikator kinerja kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah pada tahun 2023 yang diampu satu rincian output, berikut kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Rembuk Pemajuan Kebudayaan “Ngganggung Budaya Bangka Belitung” di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Kegiatan Rembuk Kebudayaan wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan mengusung tajuk “Ngganggung Budaya” yang berusaha melibatkan sebanyak mungkin para tokoh budaya, sejarawan, pelaku seni, penggiat, pemerhati budaya dan kelompok muda untuk ambil bagian dalam kegiatan ini. Kami berharap dari kegiatan ini dapat memunculkan sebuah gerakan bersama memajukan budaya di daerah. Menumbuhkembangkan minat pelaku seni budaya, mengagas lahirnya ekosistem berkesenian yang kondusif, menggerakkan sektor ekonomi kreatif dari sisi seni-budaya, dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi daerah serta mensejahterakan kehidupan masyarakat adalah muara akhir dari gagasan ini. Naskah Rembuk Kebudayaan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang berisikan rumusan rekomendasi dan rencana aksi arah pemajuan kebudayaan Kepulauan Bangka Belitung yang akan dideklarasikan pada malam kebudayaan dan diserahkan kepada pihak pemerintah sebagai pengampu urusan kebudayaan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah pusat. Naskah Rembuk Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang berisikan rumusan rekomendasi dan langkah aksi bagi arah pemajuan kebudayaan Kepulauan Bangka Belitung dideklarasikan pada malam kebudayaan dan diserahkan kepada pihak pemerintah sebagai pengampu urusan kebudayaan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah pusat pada tanggal 21 Oktober 2023 di Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Sebagai dokumen, naskah ini akan menjadi jejak bagi upaya pemajuan kebudayaan di Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai momentum, kegiatan ini adalah bukti dari peran para pelaku budaya, pelaku seni, penggiat dan pemerhati budaya di Bangka Belitung dalam melakukan kerja-kerja pemajuan kebudayaan di daerah.

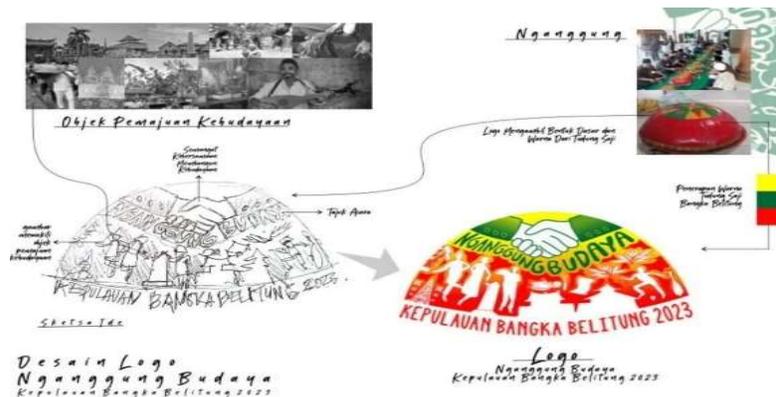


Foto 45. Desain Logo Ngganggung Budaya terinspirasi dari OPK dari Bangka Belitung



Foto 46. Desain Logo Nanggung Budaya Bangka Belitung yang dilaksanakan pada 19-21 Oktober 2023



Foto 47. Pelaksanaan Kegiatan Rembuk Budaya “Nanggung Budaya” Bangka Belitung di Kabupaten Muntok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pendampingan Publik dalam Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Workshop Penetapan CB dan OPK ini merupakan salah satu fasilitasi dalam upaya pelindungan CB dan OPK. Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 memiliki tugas melestarikan cagar budaya (CB) dan objek pemajuan kebudayaan (OPK). Dalam pelaksanaan pelindungan dan tata kelola kedua warisan budaya tersebut berbeda. Oleh karena itu pada workshop ini sesungguhnya terbagi dua kelompok dengan dua tema. Workshop Penetapan CB dan OPK di Pangkal Pinang diikuti oleh dinas yang membidangi kebudayaan dari seluruh kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, kecuali dari Kabupaten Belitung Timur, TACB, penggiat budaya, penggiat tradisi, sejarawan, dan budayawan. Kegiatan ini berjalan dengan baik, peserta sangat aktif mengangkat berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan sebagai bahan diskusi.



Foto 48. Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penetapan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan



Foto 49. Paparan Materi dari Narasumber terkait Penetapan Cagar Budaya

3. Sedekah Adat Empat Lawang Sejarangan di KCBN Muarajambi Provinsi Jambi:

Pelaksanaan kegiatan Sedekah Adat Empat Lawang Sejarangan merupakan wujud masyarakat sekitar membuat ikrar atau kesepakatan bersama untuk menjaga budaya dan kelestarian lingkungannya terutama disepanjang aliran sungai Batanghari yang ada disekitar komplek Candi Muaro Jambi. Kegiatan ini melibatkan empat desa yaitu Desa Danau Lamo, Desa Baru, Desa Kemingking Luar, dan Desa Muara Jambi, Kecamatan Maro Sebo. Lokasi kegiatan dilaksanakan di pasar Paduka (Pasar Dusun karet) yang berada di bagian utara candi Tinggi. Masyarakat desa penjaga Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi (KCBN) Muara Jambi turut berpartisipasi dalam hal berbagi hasil alam, memasak, menggelar tarian tradisional, hingga melakukan arak-arakan untuk memeriahkan festival itu, dan acara tersebut terdapat kuliner tradisional yang dimasak dengan teknologi tradisionalnya.



Foto 50. Penandatanganan kesepakatan bersama di KCBN Muarajambi



Foto 51. Pemberian cendramata dari Gubernur Jambi ke Direktur PTLK Kemdikbudristek



Foto 52. Suasana Pelaksanaan Kegiatan Empat Lawang Sejarangan yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Pj. Bupati Muaro Jambi yang dilaksanakan di Pasar Dusun Karet (PADUKA) KCBN Muarajambi

BPK Wilayah V dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan saat melaksanakan kegiatan, berikut penjelasan hambatan beserta upaya/strategi yang dilakukan BPK Wilayah V dalam melaksanakan indikator kinerja kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah:

NO	HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPASI	UPAYA/STRATEGI
1	Kegiatan sedikit terhambat dengan <i>timeschedule</i> yang disusun di awal tahun dikarenakan DIPA atas perubahan struktur organisasi yang semula Satker BPCB Provinsi Jambi menjadi BPK Wilayah V terbit per tanggal 26 Mei 2023.	Melakukan penyusunan strategi pencapaian kegiatan atas perubahan program/kegiatan satker BPK Wilayah V.	Melakukan perubahan <i>timeschedule</i> kegiatan TA 2023 selaras dengan pelaksanaan pendukung kegiatan intansi dan <i>stakeholder</i> .
2	Terdapat sisa anggaran kegiatan yang sudah terlaksana dengan persentase yang cukup besar.	Memaksimalkan daya serap pelaksanaan anggaran dengan optimal berbasis output dan <i>outcome</i> .	Melakukan optimalisasi anggaran, guna dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat urgensi dan strategi persiapan pelaksanaan kegiatan TA 2024.

SK 3

Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola

Peningkatan Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola salah satu prioritas nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yang juga menjadi salah satu prioritas yang termuat pada Renstra Kemendikbudristek. Perjanjian kinerja BPK Wilayah V tahun 2023 mengampu sasaran kegiatan meliputi meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola yang didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola.

Tingkat keberhasilan kinerja BPK Wilayah V pada tahun 2023 didukung dengan adanya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan, optimalisasi, dan strategi-strategi pencapaian dalam realisasi kegiatan khususnya pada indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah event kebudayaan daerah yang meliputi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

IKK 3.1

Jumlah Event Kebudayaan Daerah

Fasilitas Bidang Kebudayaan yang dikelola Ditjen Kebudayaan dalam hal ini meliputi bantuan pemerintah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang dikelola Sekretariat Ditjen Kebudayaan

dan bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Kebudayaan yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan.

Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara luas. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.

Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan. Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Pada tahun 2023 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan telah melaksanakan fasilitas bidang kebudayaan yang mencakup dua wilayah kerja yaitu Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 3.2.6.3 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola:

Metode Perhitungan:	
Program	: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	: Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
IKK	: Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
Satuan	: Orang/Kelompok Masyarakat
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Sumber Data	: Laporan Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola merupakan bentuk dukungan fasilitasi bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V di wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka

Belitung pada tahun 2023. Alokasi anggaran yang dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 831.193.000,-**.

Berikut penjelasan perbandingan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola TA 2023:

Capaian Kinerja Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2023		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
-	-	-	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	100%

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Alokasi	Realisasi	Capaian %
Rp831.193.000	Rp807.103.000	97,10%

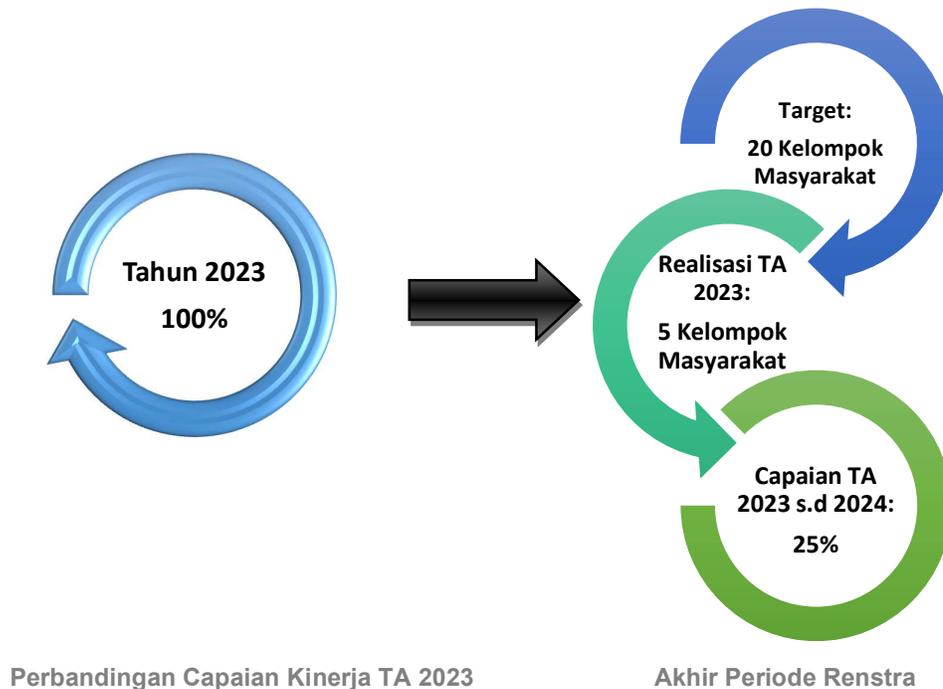
Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola tahun 2023 dicapai persentase capaian **100%** dengan target kinerja **5 Kelompok Masyarakat** dan terealisasi **5 Kelompok Masyarakat**. Tingkat keberhasilan capaian kinerja kegiatan didukung dari beberapa kegiatan yang mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023.

Pencapaian kinerja realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola tahun 2023 terserap dengan baik sebesar **Rp807.103.064,-** dengan persentase capaian **97,10%**, sehingga efisiensi anggaran sebesar **Rp 24.090.000,-** dengan persentase **2,90%**. Efisiensi anggaran didapatkan dari sisa anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan maupun dioptimalisasi seperti sisa belanja perjalanan dinas dan belanja bahan pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola tidak termasuk di perjanjian kinerja kepala, dikarenakan Indikator Kinerja Kegiatan ini dilaksanakan saat perubahan struktur organisasi dari satker BPCB Provinsi Jambi menjadi BPK Wilayah V, sehingga pada laporan kinerja TA 2023 khususnya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola tidak bisa diperbandingkan.

Hasil dari perubahan Reviu Renstra BPK Wilayah V untuk Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola memiliki target 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Gambar 3.3 Analisis Target Kinerja TA 2023-2024 dan Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra s.d Tahun 2024 pada IKK Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola



Target renstra pada Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola tahun 2023 – 2024 sebanyak **20 Kelompok Masyarakat**, selanjutnya capaian target kinerja tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak **5 Kelompok Masyarakat**, sehingga persentase capaian pelaksanaan selama 2023-2024 pada pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah sebesar **25%**. Sisa dari target renstra sebanyak **15 Kelompok Masyarakat** dengan persentase **75%** yang akan dilaksanakan pada target kinerja tahun 2024.

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola pada tahun 2023 yang diampu satu rincian output, berikut kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

RO: Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya

Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya

1. Penguatan Ekosistem Kebudayaan dalam bentuk Dukungan Aktivitas Seni Budaya:
 - Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Kenduri Swarnabhumi dan Ekspedisi Batanghari TA 2023:

Peluncuran dan pembukaan Kenduri Swarnabhumi Tahun 2023 dengan tema “Peradaban Sungai Batang Hari: Dulu, Kini, dan Nanti” akan digelar di Halaman GOS Kota Baru, Jambi pada Sabtu 24 Juli 2023. Hadir dalam peluncuran dan pembukaan Kenduri Swarnabhumi Gubernur Jambi beserta Wakil Gubernur, Dirjen Kebudayaan Kemdikbudristek, Walikota Jambi, Bupati Dharmasraya, Forkopimda Provinsi Kota Se-Jambi. Kegiatan Kenduri Swarnabhumi 2023 terdapat beberapa kegiatan di antaranya Ekspedisi Batanghari, Lokakarya dan Pemberdayaan Komunitas, Pemajuan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, Seminar dan Talkshow Peradaban DAS Batanghari, Festival Daerah, hingga Penerapan dan Penguatan Kembali Piagam Batanghari. Kegiatan yang sama dengan Pemprov Jambi dengan tema "Peradaban Sungai Batang Hari: Dulu, Kini, dan Nanti" ini bertujuan memajukan kebudayaan Melayu. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan antara kebudayaan dan pelestarian lingkungan, khususnya sungai. Sasaran Program Kenduri Swarnabhumi kali ini adalah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, dan bahkan dikembangkan sampai ke Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar). Kenduri Swarnabhumi merupakan hasil kolaborasi dan partisipasi masyarakat yang melibatkan berbagai komunitas dan pihak terkait. Dalam upaya untuk memperkuat kebudayaan lokal dan pelestarian lingkungan, pemerintah melalui Kenduri Swarnabhumi akan mengadvokasi kebijakan publik yang berbasis budaya dalam upaya menjaga sungai. Kenduri Swarnabhumi telah dilaksanakan sejak 2022 dan akan terus berlanjut dengan pengembangan dan inovasi yang lebih besar.





- Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Ekspedisi Batanghari dan Kenduri Swarnabhumi



Foto 53. Pembukaan Ekspedisi Batanghari Kenduri Swarnabhumi di Kabupaten Dharmasraya



Foto 54. Pelepasan peserta Ekspedisi Batanghari dari Jembatan Pulau Punjung



Foto 55. Seminnar budaya dan lingkungan Ekspedisi Sungai Batanghari

2. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan di Wilayah Kerja:

Kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2023 adalah untuk mendukung revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan pelestari budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa. Kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V telah berhasil menyalurkan bantuan kepada 5 peserta/ penerima bantuan yang terdiri atas 3 komunitas

budaya dan 2 perseorangan yang berasal dari wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini semoga dapat memberi stimulan kepada para pelaku budaya dalam menjaga semangat dan penyaluran ekspresi, serta kreativitas mereka untuk mengangkat ketahanan budaya. Dengan demikian diharapkan budaya tradisional yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman dengan tidak meninggalkan esensinya sehingga dapat tersampaikan kepada generasi muda penerus bangsa yang bangga akan budayanya sendiri agar keberadaannya tidak sampai punah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Jambi

BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN 2023

PENDAFTARAN
1-30 AGUSTUS 2023

AYO KIRIM PROPOSAL KAMU MELALUI LINK DI BAWAH INI

KATEGORI PERSEORANGAN → <https://bit.ly/fasilitasperseorangan>

KATEGORI KOMUNITAS BUDAYA, KELOMPOK BUDAYA, LEMBAGA BUDAYA NON-PEMERINTAH → <https://bit.ly/fasilitaskomunitas>

KIRIM MELALUI POS DENGAN ALAMAT :
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V JAMBI
JL. SAMARINDA, KOTA BARU JAMBI 36137

FASILITASI KEGIATAN :

1. PEMBERIAN APRESIASI
2. FESTIVAL/LOMBA, PEMENTASAN, PERTUNJUKAN, PAMERAN
3. UPACARA ADAT, RITUS
4. SERASEHAN/SEMINAR/DISKUSI/LOKAKARYA/WORKSHOP
5. DOKUMENTASI KARYA BUDAYA

PENERIMA BANTUAN :

1. PERSEORANGAN
2. KOMUNITAS BUDAYA
3. KELOMPOK
4. LEMBAGA ATAU ORGANISASI MASYARAKAT YANG BERGERAK DI BIDANG KEBUDAYAAN

CATATAN : PETUNJUK TEKNIS TERTERA PADA LINK DI ATAS
NARAHUBUNG : TARIDA DJAMI : 0813-6664-6990 BUDI : 0852-7466-3988

Foto 56. Pengumuman Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan 2023 yang disiarkan pada Akun Media Sosial BPK Wilayah V

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Jambi

PENGUMUMAN
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN 2023

1. SANGGAR TARI PELITO HUDDO, KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI
2. SANGGAR SENI BAKO LANTANG, KABUPATEN BATANGHARI, PROVINSI JAMBI
3. SANGGAR SENI KETAKUNG MERAH, KABUPATEN BANGKA TENGAH, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4. SURYAN, KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
5. DEDI SUPRIANSYAH, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI

www.bpk-wv.jambi.go.id
TARIDA DJAMI : 0813-6664-6990 BUDI : 0852-7466-3988

Foto 57. Pengumuman Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan 2023 di siarkan pada Akun Media Sosial BPK Wilayah V



Foto 58. Pertunjukan Sanggar Tari Pelita Mudo di Event Ngeneng Budaya dari Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan 2023 BPK Wilayah V



Foto 59. Pertunjukan Sanggar Seni Bako Lantang dari Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan 2023 BPK Wilayah V



Foto 60. Pertunjukan Sanggar Seni Ketakung Merah pada Event Kelekek Budaya dari Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan 2023 BPK Wilayah V



Foto 61. Pertunjukan Pameran Fotografi Tulisan dan Naskah Kuno dari Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan 2023 BPK Wilayah V



2. Proses membuat menggunakan lilin atau malam. Nenek Allah (56) sedang memberikan arahan pada cucunya TAQIYAH AZZAHRA (8) tentang cara membuat yang baik dan benar.



Program Pemerintahan Fasilitas
Pemajuan Kebudayaan Tahun 2023

Perempuan Pewaris Budaya Batik Jambi

Fotografer: Dedi Supriansyah

Foto 62. Publikasi hasil Fotografer dengan Tema Perempuan Pewaris Budaya Batik Jambi Pertunjukan dari Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan 2023 BPK Wilayah V

BPK Wilayah V dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan saat melaksanakan kegiatan, berikut penjelasan hambatan beserta upaya/strategi yang dilakukan BPK Wilayah V dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola:

NO	HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPASI	UPAYA/STRATEGI
1	Kegiatan sedikit terhambat dengan <i>timeschedule</i> yang disusun di awal tahun dikarenakan DIPA atas perubahan struktur organisasi yang semula Satker BPCB Provinsi Jambi menjadi BPK Wilayah V terbit per tanggal 26 Mei 2023.	Melakukan penyusunan strategi pencapaian kegiatan atas perubahan program/kegiatan satker BPK Wilayah V.	Melakukan perubahan <i>timeschedule</i> kegiatan TA 2023 selaras dengan pelaksanaan pendukung kegiatan intansi dan <i>stakeholder</i> .
2	Terdapat sisa anggaran kegiatan yang sudah terlaksana dengan persentase yang cukup besar.	Memaksimalkan daya serap pelaksanaan anggaran dengan optimal berbasis output dan <i>outcome</i> .	Melakukan optimalisasi anggaran, guna dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat urgensi dan strategi persiapan pelaksanaan kegiatan TA 2024.

SK 4

Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan diperlukan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah guna dalam meningkatkan kinerja pemerintah, dan tata kelola pemerintahan yang dikelola dengan baik yang bertujuan untuk menciptakan kondisi didasarkan atas asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas.

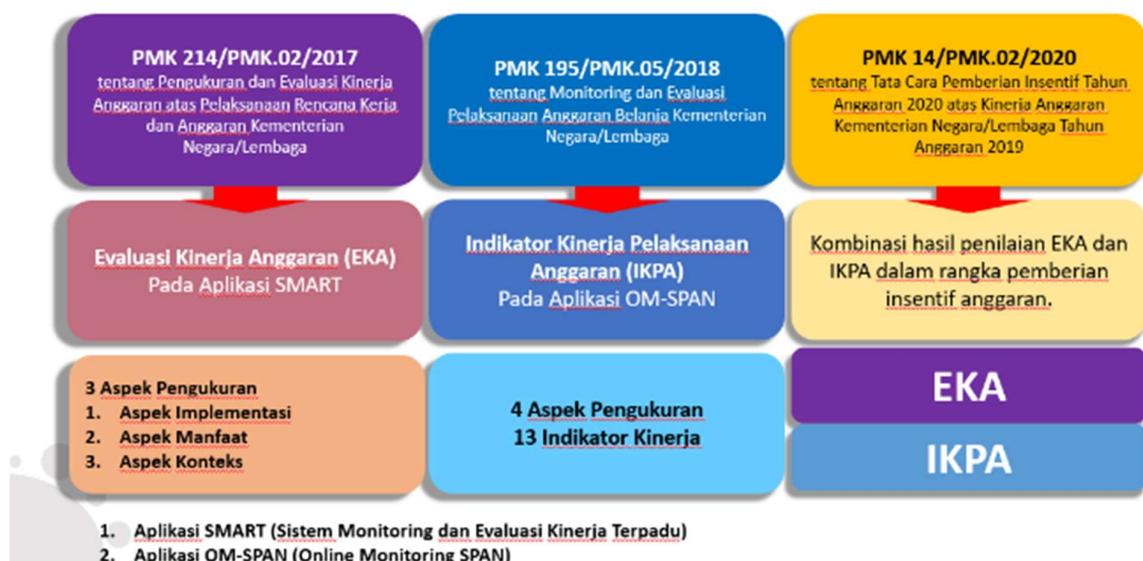
Upaya BPK Wilayah V dalam Peningkatan tata kelola pelestari Warisan Budaya merupakan sasaran kegiatan yang mendukung program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan tertuang pada Renstra Kemendikbudristek tahun 2020 – 2024, dan tertuang pada perjanjian kinerja BPK Wilayah V tahun 2023 mengampu sasaran kegiatan meliputi meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi, dan Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi.

IKK 4.1

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN sebagai tolak ukur penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran kegiatan. Besarnya daya serap anggaran yang direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian. Pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai strategi-strategi dalam pencapaian daya serap yang optimal sesuai dengan target yang ditentukan dalam percepatan penyerapan anggaran.

Gambar 3.4 Alat Pengukuran Evaluasi Kinerja



Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id>

Hasil dari penyerapan anggaran dibutuhkan evaluasi kinerja anggaran sebagai proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Alat pengukuran evaluasi kinerja dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:

Metode Perhitungan:	
IKK	: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
Program	: Dukungan Manajemen Satker
Satuan	: Nilai
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Formulasi Perhitungan	: Perhitungan Pencapaian Daya Serap Anggaran
Sumber Data	: Hasil Akhir Pencapaian Daya Serap Anggaran

Gambar 3.5 Analisis Capaian Kinerja TA 2023 dan Perbandingan TA 2022 pada IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V



Pada tahun 2023 pada indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V telah berhasil mendapatkan nilai kinerja anggaran melebihi target dengan nilai sebesar **94,68%**. Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran tahun anggaran 2023 dengan target sebesar **91%** melebihi capaian target sebesar **3,68%** dengan persentase capaian kinerja sebesar **104,04%**, sehingga dapat disimpulkan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dapat meningkatkan kualitas kinerja anggaran yang transparansi dan akuntabilitas interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 sedikit mengalami penurunan sebesar **0,76%**, dikarenakan penurunan nilai untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terutama pada komponen indikator deviasi halaman III DIPA hanya berbobot nilai sebesar **65%** sehingga mempengaruhi komposisi penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V pada tahun 2023.

Gambar 3.5 Analisis Capaian Kinerja TA 2023 pada RO Layanan Umum, Layanan Perkantoran, dan Layanan Sarana Internal



Program dukungan manajemen yang diampu oleh BPK Wilayah V TA 2023 merupakan kegiatan rutin dalam pengadministrasian satker, dan mendukung dalam terlaksananya kegiatan output teknis memiliki Pagu Anggaran sebesar **Rp11.873.159.000,-** berikut rincian alokasi anggaran beserta realisasi anggaran pada dua rincian output kegiatan tersebut :

RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
Layanan Umum	Rp1.146.221.000	Rp1.133.350.344	98,88%
Layanan Perkantoran	Rp10.726.938.000	Rp9.818.369.447	91,53%
Layanan Sarana Internal	Rp195.824.000	Rp121.505.764	62,05%
Total	Rp11.873.159.000	Rp 10.951.719.791	92,24%

Berikut rincian kegiatan-kegiatan yang meliputi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen kebudayaan oleh BPK Wilayah V TA 2023:

LAYANAN UMUM	LAYANAN PERKANTORAN	LAYANAN SARANA INTERNAL
<p>105. Layanan Ketatausahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Data Dukung Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan ▪ Monitoring dan Evaluasi/ Raker/ Asistensi ▪ Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan ▪ Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ▪ Pensertifikatan Aset BMN ▪ Pendukung pengelolaan dan Pemanfaatan BMN di KCBN Muarajambi ▪ Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Administrasi dan Teknis Pelestarian CB dan OPK 	<p>001. Gaji dan Tunjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS <p>002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keperluan sehari-hari Perkantoran ▪ Langganan Daya dan Jasa ▪ Pemeliharaan Rutin Kantor ▪ Pembayaran Terkait Operasional Perkantoran 	<p>996. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peralatan Pengolahan Data dan Komunikasi, Keamanan di Kantor Kota Jambi dan KCBN Muarajambi <p>997. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peralatan Fasilitas Kantor dan Kesehatan di kantor Kota Jambi dan KCBN Muarajambi

BPK Wilayah V dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan saat melaksanakan kegiatan, berikut penjelasan hambatan beserta upaya maupun strategi yang dilakukan BPK Wilayah V dalam melaksanakan indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi:

NO	HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPASI	UPAYA/STRATEGI
1.	Kurangnya partisipasi dan pemahaman pegawai terkait penilai kinerja anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun belum terlaksana.	Melakukan penguatan sistem pengendalian intern terkait strategi pencapaian. penilaian kinerja anggaran yang optimal	Melakukan sosialisasi intern terkait kinerja anggaran atas pelaksanaan kegiatan dilingkungan Satker.
2.	Kurangnya monitoring dari pelaksanaan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Melakukan penguatan sistem pengendalian intern terkait pelaksanaan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Melakukan konsultasi dan bimbingan teknis kepada tim kanwil DJPb Provinsi Jambi terkait strategi pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang optimal sesuai prosedur penilaian anggaran.

IKK 4.2

Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, sehingga BPK Wilayah V berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan baik, yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 4.2 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi:

Metode Perhitungan:	
IKK	: Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
Program	: Dukungan Manajemen Satker
Satuan	: Predikat
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Formulasi Perhitungan	: Kelengkapan dokumen evaluasi SAKIP
Sumber Data	: Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Pada tahun 2023 pada indikator kinerja kegiatan predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V tidak memiliki target untuk penilaian SAKIP tahun 2023, dikarenakan atas perubahan struktur organisasi satker dari BPCB Provinsi dengan empat wilayah kerja yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, berubah menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dengan dua wilayah kerja yaitu Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 3.3 Analisis Capaian Kinerja TA 2020-2022 dan Target Periode Renstra Tahun 2020-2024 pada IKK Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V



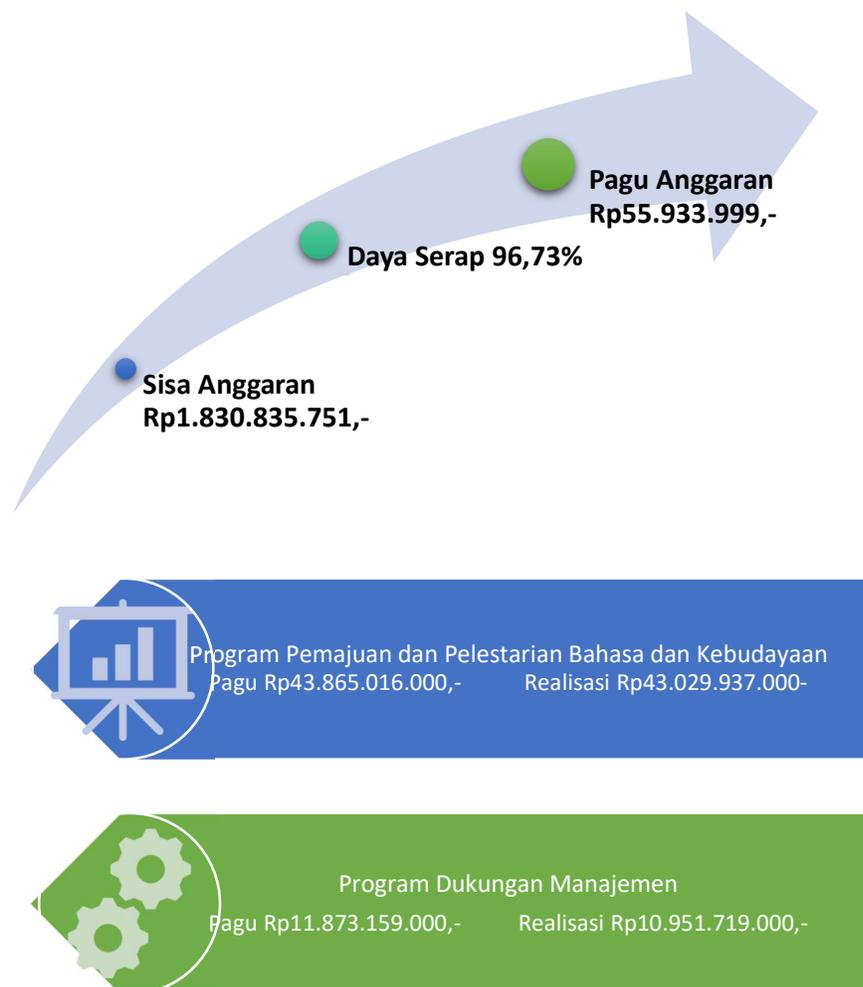
BPK Wilayah V Provinsi Jambi dalam persiapan pelaksanaan penilaian predikat SAKIP pada tahun 2024, terdapat hambatan saat melaksanakan kegiatan, berikut penjelasan hambatan beserta upaya maupun strategi yang dilakukan BPK Wilayah V dalam upaya persiapan pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V tahun 2024:

NO	HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPASI	UPAYA/STRATEGI
1.	Kurangnya pemahaman dan partisipasi pegawai tentang prosedur pengukuran penilaian SAKIP TA 2023.	Melakukan penguatan sistem pengendalian intern terkait strategi pencapaian penilaian SAKIP yang optimal.	Melakukan sosialisasi intern terkait evaluasi SAKIP dilingkungan Satker.
2.	Kurang optimalnya pelaksanaan evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan kegiatan dilapangan secara periodik TA 2023.	Melakukan penguatan sistem pengendalian intern terkait evaluasi dan monitoring.	Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan, dan membentuk tim pelaksana evaluasi dan monitoring kegiatan.
3	Banyaknya atas perubahan dokumen terkait penilaian SAKIP berupa Renstra, DIPA, dan pelaksanaan tugas dan fungsi atas perubahan satker baru BPK Wilayah V, dan Evaluasi/Monitoring secara manual maupun aplikasi.	Melakukan upaya dan penyesuaian atas perubahan struktur organisasi satker baru BPK Wilayah V.	Melaksanakan Reviu Renstra, Penyesuaian timeschedule sebagai bahan evaluasi/monitoring, serta penyesuaian target kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran BPK Wilayah V yang tertuang dalam DIPA 2023 sebesar **Rp55.933.999.000,-** (Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berhasil direalisasikan sebesar **Rp54.103.163.000,-** (Lima Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan persentase daya serap sebesar **96,73%**. Pagu anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian yang menyajikan persentase alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran kegiatan beserta indikator kinerja yang dilaksanakan oleh BPK Wilayah V tahun 2023;



SK.1 Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Capaian Kinerja Anggaran:

98,15%

Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Pagu Anggaran: Rp. Rp. Rp42.383.823.000,-
Realisasi Anggaran: Rp41.601.800.000,-

SK.2 Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah

Capaian Kinerja Anggaran:

95,54%

Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah

Pagu Anggaran: Rp. 650.000.000,-
Realisasi Anggaran: Rp. 621.033.000,-

SK.3 Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola

Capaian Kinerja Anggaran:

97,10%

Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola

Pagu Anggaran: Rp. 831.193.000,-
Realisasi Anggaran: Rp. 807.103.000,-

SK.4 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

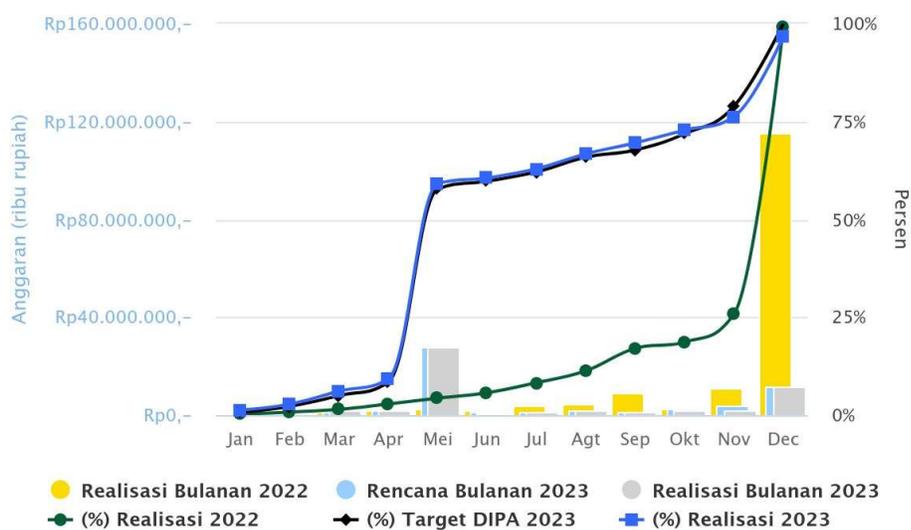
Capaian Kinerja Anggaran:

92,24%

Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

Pagu Anggaran: Rp. Rp11.873.159.000,-
Realisasi Anggaran: Rp. 10.951.719.791,-

Grafik 3.1 Capaian Realisasi Anggaran TA 2023



2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, BPK Wilayah V berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **3,27%** atau **Rp 1.830.835.751,-** dari pagu anggaran sebesar **Rp55.933.999,-** dengan rata-rata capaian 4 (empat) Sasaran Kegiatan beserta 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan sebesar **110,90%**. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

- 1) Optimalisasi kegiatan yang menggunakan belanja perjalanan dinas serta belanja operasional kegiatan swakelola yang sudah terelisasi,
- 2) Optimalisasi kegiatan belanja modal dan belanja barang pada pekerjaan pemeliharaan (pengadaan langsung),
- 3) Optimalisasi belanja operasional dan pemeliharaan kantor pada program dukungan manajemen satker, dan
- 4) Sisa anggaran belanja pegawai dikarenakan beberapa pegawai mutasi, pensiun dan meninggal dunia.

Berikut matriks rincian efisiensi anggaran berdasarkan rincian output tahun anggaran 2023:

(dalam ribuan rupiah)

Program/ Rincian Output	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran	Capaian Efisiensi %
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan					
Naskah Pelestarian Warisan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Pelindungan Cagar Budaya Bawah Air di Pulau Belitung, dan Studi Pelindungan Cagar Budaya Parit dan Kolam Kuno KCBN Muarajambi 2. Studi Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kab Belitung dan Belitung Timur dan Studi Pemajuan dan Kebudayaan WBTB Nasional Perang Ketupat di Kab. Bangka Barat, Kep. Bangka Belitung 3. Pendampingan Publik dalam Pengusulan Penetapan Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabutapten dan Kota di Provinsi Jambi 	Rp555.880	Rp441.892	Rp113.987	20,51%
Giats Warisan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rembuk Pemajuan Kebudayaan di Kab. Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Pendampingan Publik dalam Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di Prov. Kep Bangka Belitung 	Rp650.000	Rp621.033	Rp28.966	4,46%

Program/ Rincian Output	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran	Capaian Efisiensi %
Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Ekosistem Kebudayaan dalam bentuk Dukungan Aktivitas Seni Budaya 2. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan di Wilayah Kerja 	Rp 831.193	Rp 807.103	Rp 24.089	2,90%
Data dan Informasi Warisan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 	Rp125.000	Rp 87.349	Rp 37.650	30,12%
Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan Lahan di KCBN Muarajambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, 2. Penangan Temuan ODCB di Wilayah Kerja 3. Pemetaan dan Ekskavasi Situs Makam Siti Hawa Kab. Tanjabtim dan Pemetaan Arkeologi di Situs KCBN Muarajambi 4. Pemugaran Cagar Budaya Nasional Pesanggrahan Menumbing dan Pemugaran Candi Klaster Gumpung-Tinggi KCBN Muarajambi di Wilayah Kerja 5. Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Cagar Budaya Nasional di Wilayah Kerja 6. Perencanaan Penataan Lingkungan Candi Kotomahligai KCBN Muarajambi (DED) 7. Penguatan Ekosistem Kebudayaan Berbasis WBTB di KCBN Muarajambi 	Rp 41.702.943	Rp 41.072.559	Rp 630.383	98,49%
Program Dukungan Manajemen					
Layanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Data Dukung Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan 2. Monitoring dan Evaluasi/ Raker/ Asistensi 3. Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan 4. Peningkatan SDM 5. Pensertifikatan Aset BMN 6. Pendukung pengelolaan dan Pemanfaatan BMN di KCBN Muarajambi 7. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Administrasi dan Teknis Pelestarian CB dan OPK 	Rp 1.146.221	Rp 1.133.350	Rp 12.870	7,76%

Program/ Rincian Output	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran	Capaian Efisiensi %
Layanan Perkantoran	1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, 2. Pemeliharaan Rutin Kantor, dan 3. Pembayaran Terkait Operasional Perkantoran.	Rp 10.726.938	Rp 9.818.369	Rp 908.568	8,47%
Layanan Sarana Internal	1. Peralatan Pengolahan Data dan Komunikasi, Keamanan di Kantor Kota Jambi dan KCBN Muarajambi 2. Peralatan Fasilitas Kantor dan Kesehatan di kantor Kota Jambi dan KCBN Muarajambi	Rp195.824	121.505	74.318	37,96%
Total		Rp55.933.999	Rp54.103.163	Rp1.830.835	3,27%

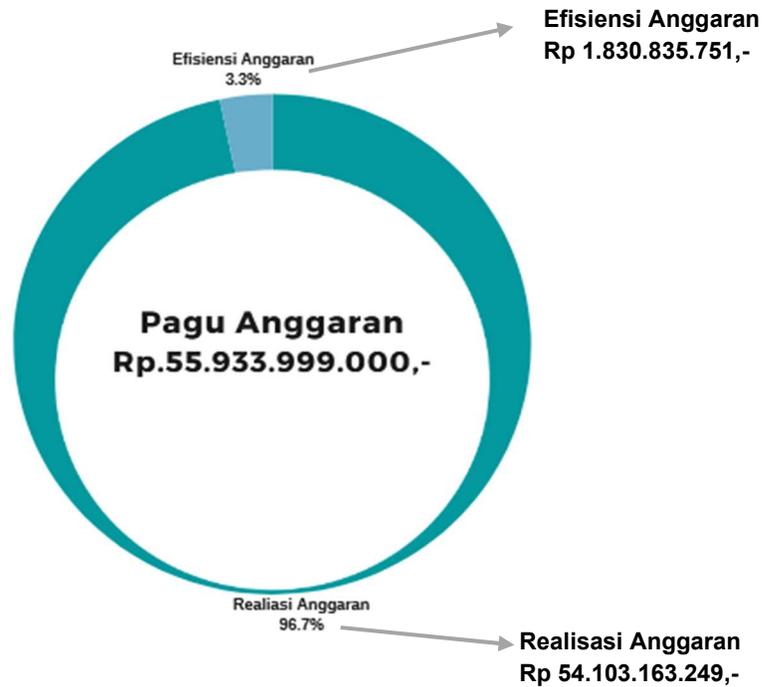
BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2023, BPK Wilayah V berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan:

Ringkasan Kinerja

4.1. Grafik Kinerja Keuangan



4.2 Grafik Rata-Rata Capaian Kinerja: 110,90%



Sepanjang tahun 2023, BPK Wilayah V telah melakukan berbagai strategi dalam pelaksanaan kegiatan dengan tingkat keberhasilan di atas target yang direncanakan. Pencapaian kinerja BPK Wilayah V tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan berhasil dengan capaian rata-ratanya sebesar **110,90%** dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.55.933.999.000,-** persentase **96,73%** dari total pagu sebesar **Rp 54.103.163.249,-**, dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp.1.830.835.751,-** persentase sebesar **3,27%**.

Pencapaian sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, berbagai inovasi dan strategi telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Penyesuaian DIPA TA 2023 BPK Wilayah V yang bersumber dari BA-BUN sebesar Rp. 9.221.943.000,- yang ditetapkan pada bulan September 2023, sehingga BPK Wilayah V melaksanakan kegiatan dengan strategi percepatan kegiatan dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten, instansi Pemerintah Daerah serta *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi,
2. Melakukan kerjasama dalam program kolaborasi antar lintas kementerian, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun *Stakeholder* dalam wujud peningkatan sinergitas program prioritas nasional maupun pusat dan daerah, dan
3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Digital Internal BPK Wilayah V mempermudah Satker mengakses melalui jaringan lokal serta proses pengarsipan dokumen laporan, foto kegiatan, video kegiatan maupun gambar serta dokumen lainnya yang sudah didigitalisasi.

Meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan ditahun yang akan datang BPK Wilayah V akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan program prioritas nasional pada kegiatan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi,
2. Penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder untuk meningkatkan sinergitas kegiatan nasional maupun daerah dalam pelestarian warisan budaya,
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pelestarian warisan budaya,

4. Pengoptimalisasi anggaran serta mereviu/ memonitoring kembali kegiatan yang belum terlaksana setiap bulannya agar rencana di tahun berikutnya dapat terealisasi sesuai dengan jadwal Kegiatan (*timeschedule*) dan *Actionplan* terkait pencapaian nilai kinerja anggaran serta penilaian Sakip, dan
5. Penataan tata kelola BPK Wilayah V melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V

Jalan Samarinda Kotabaru, Jambi Kode Pos 36137
Telepon. (0741) 40126 Faksimile (0741) 42093
Laman kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbajambi
Pos-el bpcbajambi@kemdikbud.go.id; bp3jambi@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V
TAHUN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Tahun Anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jambi, 30 Januari 2023

Ketua Tim Reviu/SPI

Henderi Kus

NIP 198506052009121002



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Widiatmoko

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jambi, 27 Juni 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah V,**



Hilmar Farid



Agus Widiatmoko

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	46
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	4
3	[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	5
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	91

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp. 34.643.073.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 12.217.583.000
		TOTAL	Rp. 46.860.656.000

Jambi, 27 Juni 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah V,



Hilmar Farid



Agus Widiatmoko



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Widiatmoko

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jambi, 18 Desember 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah V,**



Hilmar Farid

Agus Widiatmoko

Target Kinerja

#	Sasaran/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	46
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	4
3	[SK 3.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	5
4	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	91
		[IKK 4.2] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp. 43.865.016.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 12.068.983.000
		TOTAL	Rp. 55.933.999.000

Jambi, 18 Desember 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah V,**



Hilmar Farid

Agus Widiatmoko



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 1
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAMBI
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAMBI s.d Bulan Juni Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	319	TW1 : 56	TW1 : 56
1	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Orang	5367	TW1 : 0	TW1 : 0
2	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Predikat	BB	TW1 : -	TW1 : -
2	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Nilai	92	TW1 : -	TW1 : -

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.46.860.656.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 07 Juni 2023 sebesar **Rp. 6.010.482.420** atau **12.83%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 07 Juni 2023 **Rp. 40.850.173.580**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

- IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Progress / Kegiatan :

1. Pemoangan rumput KCBN Muarajambi, Kompleks Percandian Bumiayu-Sumatera Selatan, Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno CBN Bengkulu sebanyak 54 unit
2. Penyelamatan dan Penanganan Kasus di KCBN Muarajambi sebanyak 2 unit

Kendala / Permasalahan :

Kegiatan penyelamatan dan penanganan kasus yang tidak bisa direncanakan secara pasti karena bersifat insidental dan memerlukan penelusuran temuan Obyek Diduga Cagar Budaya dan peninjauan ke lokasi secara langsung

Strategi / Tindak Lanjut :

Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kegiatannya dapat diatur dengan baik dan tepat sasaran

B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

- IKK 2.1 Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Progress / Kegiatan :

belum ada kegiatan yang bisa dilakukan di TW 1

Kendala / Permasalahan :

perubahan organisasi sehingga pemakaian anggaran terbatas hanya boleh pada kegiatan rutin dan bersifat insidental

Strategi / Tindak Lanjut :

penyusunan kegiatan menyesuaikan dengan bentuk organisasi baru yang mencakup Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan

C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

Progress / Kegiatan :

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022
2. Pengesahan Laporan Kegiatan Unit Satuan Kerja Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2022
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023
4. Pengisian Matriks update data capaian tahun 2022 terkait progres Pelestarian KCBN Muarajambi melalui tautan
5. Pengisian format atribut yang dibutuhkan untuk satker baru BPK Wilayah V
6. Penyusunan konsep rencana program, kegiatan, dan anggaran unit kerja Pagu Reorganisasi Tahun 2023

Kendala / Permasalahan :

Perubahan organisasi menyebabkan penyusunan ulang Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja Tahun 2023

Strategi / Tindak Lanjut :

Pembuatan Konsep Prgram yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Organisasi baru yang mencakup Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan

D . SK 3.0 Meningkatkan tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

Progress / Kegiatan :

1. Mengikuti kegiatan Bimtek dan Sosialisasi terkait IKPA dan EKA Tahun Anggaran 2022
2. Memastikan penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan target yang direncanakan
3. Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

Kendala / Permasalahan :

Reorganisasi dari BPCB Provinsi Jambi menjadi BPK Wilayah V, perubahan kode nomenklatur kegiatan sehingga menyebabkan anggaran DIPA rutin satker lama untuk kegiatan teknis belum dapat dipergunakan pada TW 1.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melaksanakan Koordinasi dengan DJA dan Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk penyusunan Pagu Reorganisasi yang baru TA 2023, sehingga anggaran dapat rilis dengan lebih cepat dan program kegiatan segera dapat dilaksanakan di tahun 2023

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Silahkan dilanjutkan ke tw2

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jambi, 07 Juni 2023

Kepala BPCB Provinsi Jambi



Agus Widiatmoko



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	46	TW2 : 32	TW2 : 32
1	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	Kegiatan	4	TW2 : 0	TW2 : 0
2	[SK 3.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	5	TW2 : 0	TW2 : 0
3	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	Predikat	0	TW2 : 0	TW2 : 0
4	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	Nilai	91	TW2 : 0	TW2 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.46.860.656.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 21 Juli 2023 sebesar **Rp. 34.743.822.721** atau **74.14%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 21 Juli 2023 **Rp. 12.116.833.279**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

- IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Progress / Kegiatan :

1. Pembayaran Lahan Pelindungan CB Tahun 2022 di KCBN Muarajambi yang dilaksanakan di Dua Desa yaitu Desa Muara Jambi (pelaksanaan) pada minggu akhir Bulan Mei) dan Desa Danau Lamo (pelaksanaan pada minggu pertama bulan Juni), 2. Koordinasi awal persiapan kegiatan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Nasional Pesanggrahan Menumbing Mentok Kab. Bangka Barat, Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (pelaksanaan pada minggu akhir bulan Juni), dan 3. Pemeliharaan Fasilitas Penunjang CBN di wilayah Kerja (kegiatan berupa pembayaran honor jurupelihara NON PNS, dan pemeliharaan pertamanan dan fasilitas penunjang di KCBN Muarajambi yang dilaksanakan setiap bulannya).

Kendala / Permasalahan :

DIPA Reorganisasi baru turun pada tanggal 28 Mei 2023

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan action plan dan penyesuaian timeschedule kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan III dan triwulan IV.

B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah

- IKK 2.1 Jumlah event kebudayaan daerah

Progress / Kegiatan :

Dalam Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Kendala / Permasalahan :

DIPA Reorganisasi baru turun pada tanggal 28 Mei 2023

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan action plan dan penyesuaian time schedule kegiatan yang akan dilaksanakan menyesuaikan dengan time schedule yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan. Hal ini dikarenakan kegiatan bersifat pendukung event Nasional

C . SK 3.0 Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

- IKK 3.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Progress / Kegiatan :

Dalam Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan yaitu penyusunan Juknis dan Prosedur Operasional Standar Pembuatan SK Tim Verifikasi.

Kendala / Permasalahan :

DIPA Reorganisasi baru turun pada tanggal 28 Mei 2023

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan action plan dan penyesuaian timeschedule kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan III dan triwulan IV.

D . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

- IKK 4.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

Progress / Kegiatan :

Telah melaporkan capaian IKK TW 2 sesuai dengan target kinerja awal

Kendala / Permasalahan :

Reorganisasi UPT Satker sehingga anggaran kegiatan baru berjalan sesudah turunnya DIPA per 28 Mei 2023

Strategi / Tindak Lanjut :

Penilaian predikat SAKIP tidak dilakukan di tahun 2023 sesuai dengan kebijakan Biro Perencanaan.

E . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

- IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

Progress / Kegiatan :

Dalam tahap Pelaksanaan kegiatan berupa penyerapan anggaran (DIPA) Triwulan II serta penilaian IKPA dan NKA Triwulan II.

Kendala / Permasalahan :

DIPA Reorganisasi baru turun pada tanggal 28 Mei 2023

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan action plan dan penyesuaian timeschedule kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan III dan triwulan IV

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Agar segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang dijadwalkan untuk memenuhi target capaian kinerja di TRIWULAN III (TW3)

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jambi, 21 Juli 2023

**Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah V**



Agus Widiatmoko



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	46	TW3 : 44	TW3 : 47
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	Kegiatan	4	TW3 : 2	TW3 : 3
3	[SK 3.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	5	TW3 : 3	TW3 : 4
4	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	Predikat	0	TW3 : 0	TW3 : 0
5	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	Nilai	91	TW3 : 0	TW3 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.55.933.999.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 29 Oktober 2023 sebesar **Rp. 39.832.929.701** atau **71.21%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 29 Oktober 2023 **Rp. 16.101.069.299**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

- IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Progress / Kegiatan :

Pada Triwulan III melaksanakan kegiatan berupa: 1. Telah Melaksanakan Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dan Dokumentasi Foto Geotaging atas tanah BMN Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi , 2. Pembersihan Rumput Lokasi Kanal parit Johor dan Pembuatan konblok dan pembuatan bangunan lokasi pedagang di KCBN muarajambi serta Penanaman pohon bambu rumput, 3. Pemetaan dan Ekskavasi situs makam siti hawa kab. tanjabtim, 4. Penanganan kasus temuan Cagar Budaya, 5. pemugaran bangunan CBN Pesanggrahan Menumbing, Muntok, Kob. Bangka Barat dalam proses Pelaksanaan Kegiatan, 6. Studi Perlindungan CB Bawah air, dan kegiatan studi perlindungan OP Kab. Belitung dan Belitung Timur, 7. Inventarisasi CB dan OPK di Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung dan Prov. Jambi.

Kendala / Permasalahan :

Proses Administrasi sedikit terhambat dikarenakan maintenance aplikasi, dan proses penataan program kerja untuk triwulan III dan IV.

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan action plan dan penyesuaian timeschedule kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan IV.

B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah

- IKK 2.1 Jumlah event kebudayaan daerah

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan III berupa: 1. Rembuk Pemajuan Kebudayaan se-Provinsi Jambi dan Prov. Kep Bangka Belitung, dan 2. Pendampingan publik dalam perlindungan CB da Telah Melaksanakan Kegiatan Pendampingan publik dalam perlindungan CB dan OPK di Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung.

Kendala / Permasalahan :

Proses Administrasi sedikit terhambat dikarenakan maintenance aplikasi, dan proses penataan program kerja untuk triwulan III dan IV.

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan action plan dan penyesuaian timeschedule kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan IV.

C . SK 3.0 Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

- IKK 3.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV berupa: 1.Penguatan Ekosistem Kebudayaan dalam bentuk Dukungan Aktivitas Seni Budaya (Pendukung kegiatan Swarnabumi Persiapan, Pelaksanaan dan Penutupan Pelaksanaan Kegiatan), dan 2. Bantuan Pemerintah Fasilitasi pemajuan Kebudayaan di Wilker BPK-V sedang dalam Tahap Persiapan.

Kendala / Permasalahan :

Proses Administrasi sedikit terhambat dikarenakan maintenance aplikasi, dan proses penataan program kerja untuk triwulan III dan IV.

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan action plan dan penyesuaian timeschedule kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan IV.

D . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

- IKK 4.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

Progress / Kegiatan :

Pada tahun 2023 tidak ada pelaksanaan penilaian SAKIP pada Satker.

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada Kendala

Strategi / Tindak Lanjut :

Tidak ada Strategi

E . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

- IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

Progress / Kegiatan :

Masih dalam tahap pelaksanaan penilaian NKA

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala dalam tahap pelaksanaan penilaian

Strategi / Tindak Lanjut :

Pencapaian Nilai NKA dengan progress daya serap, penilaian EKA dan IKPA s.d 31 Desember 2023.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Kegiatan yang belum di terealisasi di Triwulan III untuk segera dilaksanakan di Triwulan IV, selanjutnya memetakan anggaran yang tidak terserap/sisa anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk dilakukan optimalisasi ke kegiatan lainnya.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jambi, 29 Oktober 2023

**Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah V**



Agus Widiatmoko



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	46	TW4 : 46	TW4 : 55
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	Kegiatan	4	TW4 : 4	TW4 : 4
3	[SK 3.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	5	TW4 : 2	TW4 : 5
3	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	Predikat	0	TW4 : 0	TW4 : 0
4	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi	Nilai	91	TW4 : 91	TW4 : 94,68

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.55.933.999.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 54.103.163.249** atau **96,73%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 1.830.835.751**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

- IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Progress / Kegiatan :

Pada Triwulan IV melaksanakan kegiatan berupa: 1. Penguatan Ekosistem Kebudayaan Berbasis WBTB di KCBN Muarajambi dalam bentuk studi komparasi pengelolaan UMKN berbasis nilai budaya di pasar papringan Temanggung, Jawa Tengah, 2. Pemetaan Arkeologi di KCBN Muarajambi, 3. Pembebasan Lahan di KCBN Muarajambi, 4. Persiapan Pelaksanaan kegiatan TA 2024 berupa Konsultan individual pada Analisis Dampak Lingkungan dan Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Pembangunan Museum KCBN Muarajambi pada TA 2024, Perencanaan DED Penataan Lingkungan di Kotomahligai, dan Revitalisasi Kapal Tradisional di KCBN Muarajambi, dan 5. Pelaksanaan Perbaikan struktur Klaster Candi Gumpung dan Candi Tinggi di KCBN Muarajambi.

Kendala / Permasalahan :

Proses Administrasi sedikit terhambat dikarenakan maintenance aplikasi, dan proses penataan program kerja s.d Bulan Desember 2023, serta persiapan pelaksanaan program TA 2024.

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan Action Plan dan penyesuaian timeschedule program kerja s.d Bulan Desember 2023, dan Penataan Program Kerja untuk TA 2024.

B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah

- IKK 2.1 Jumlah event kebudayaan daerah

Progress / Kegiatan :

Pada Triwulan IV melaksanakan kegiatan Rembuk Pemajuan Kebudayaan "Nganggung Budaya" di Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Kendala / Permasalahan :

Proses Administrasi sedikit terhambat dikarenakan maintenance aplikasi, dan penyesuaian pelaksanaan program kegiatan yang belum terlaksana s.d Bulan Desember 2023.

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan Action Plan dan penyesuaian timeschedule kegiatan s.d Bulan Desember 2023.

C . SK 3.0 Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

- IKK 3.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan pada Triwulan IV berupa : 1. Bantuan Pendukung dan Fasilitas Pemanfaatan Warisan Budaya di Wilayah Kerja sebanyak 5 Kelompok Masyarakat/Komunitas, 2. Pendukung Penguatan Ekosistem Kebudayaan dalam bentuk Dukungan Aktivitas Seni Budaya .

Kendala / Permasalahan :

Proses Administrasi sedikit terhambat dikarenakan maintenance aplikasi, dan penyesuaian pelaksanaan program kegiatan yang belum terlaksana s.d Bulan Desember 2023.

Strategi / Tindak Lanjut :

Penyusunan Action Plan dan penyesuaian timeschedule program kerja s.d Bulan Desember 2023.

D . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

- IKK 4.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

Progress / Kegiatan :

Pada tahun 2023 tidak ada pelaksanaan penilaian SAKIP pada Satker.

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala/ Permasalahan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Mempersiapkan dokumen-dokumen terkait penilaian SAKIP Tahun 2024.

E . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

- IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Kota Jambi

Progress / Kegiatan :

Penilaian NKA BPK Wilayah V s.d Bualan Desember 2023 terdiri dari nilai IKPA sebesar 92,08%, dan EKA sebesar 95,63%. Proses penilaian ini didukung oleh penyelesaian dan tertib administrasi keuangan dan perencanaan, serta capaian output yang terealisasi dan daya serap anggaran s.d 31 Desember 2023.

Kendala / Permasalahan :

Bobot nilai konversi untuk indikator konsistensi dan deviasi halaman III DIPA masih dalam kategori cukup sehingga persentasi bobot nilai dari indikator tersebut untuk mendukung penilaian IKPA hanya 5,2% dari batas maksimal penilai indikator tersebut sebesar 10%.

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi pencapaian untuk pendukung penilaian IKPA dan EKA tahun 2024 secara maksimal dibutuhkan monitoring khususnya indikator konsistensi halaman III DIPA dan perlu dilakukan revisi/penyesuaian secara berkala setiap per triwulan tahun anggaran berjalan, dan juga memonitoring dan evaluasi capaian output, daya serap anggaran dan tertib administrasi keuangan dan perencanaan setiap bulannya.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Pentingnya penerapan model Pengelolaan Program dan Anggaran Melalui Pengendalian Berkelanjutan 2. Kedisiplinan dalam bekerjasama antara pengelola program dan anggaran sesuai dengan komitmen yang ditetapkan bersama

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jambi, 17 Januari 2024

**Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah V**



Agus Widiatmoko

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V

Wilayah Kerja Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Samarinda, Kotabaru, Jambi 36137

Telepon 0741-40126 Faksimile 0741-42093

Laman: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb-jambi

Pos-el: bpcb-jambi@kemdikbud.go.id ; bp3jambi@gmail.com

Instagram : [@cagarbudayajambi](https://www.instagram.com/cagarbudayajambi)

